



PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jl. Sulawesi No. 1 Telp. (0551) 21072-21859, Tarakan 77121
Laman : <http://itwil.tarakankota.go.id> Pos-el : inspektorat@tarakankota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

OLEH TIM REVIU KINERJA
INSPEKTORAT KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami terhadap Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi dalam Laporan Kinerja yang disajikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.

Tarakan, 27 Februari 2025

Inspektur



ABD. AZIS HASAN, A.P, M.H.
Pemula Utama Muda
NIP. 19750212 199501 1 001

BerAKHLAK
Berani Berprestasi, Berkeadilan Berkeadilan
Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

**KERTAS KERJA REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	PERNYATAAN	CHECKLIST	Catatan
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√

NO.	PERNYATAAN	CHECKLIST	Catatan	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-	
		10. IKU dan IK telah SMART	√	

CATATAN HASIL REVIU

NO.	CATATAN PERBAIKAN
1.	-

LEMBAR ASISTENSI KESESUAIAN FORMAT LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tanggal : 13/02/2025

Indikator Penilaian		Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan	Paraf analis
1.	LKIP telah menyajikan capaian dan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	✓	✓		f
2.	LKIP telah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	✓	✓	Perlu Penyesuaian Format tabel	f 23/02
3.	LKIP telah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	✓	✓		f
4.	LKIP telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	-	-		f
5.	LKIP telah menyajikan analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	✓	masih ditemukan analisis penyebab ketidaktercapaian yang terlalu umum (peningkatan skor PPH)	f 23/02
6.	LKIP telah menyajikan analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	✓	Perlu Penyesuaian Format	f 24/02
7.	LKIP menyajikan analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai dengan foto/diagram/grafik	✓	✓	Grafik tren Capaian bln terasasi	f 23/02

8.	LKIP telah menyajikan penghargaan yang telah diterima di tahun bersangkutan	✓	✓		f
9.	LKIP telah menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya	✓	✓	Kesimpulan dan Rencana tindak lanjut telah memuat seluruh kinerja	f 23/61
	LKIP telah melampirkan :				
	a. IKU Perangkat Daerah	✓	✓		f
	b. Perjanjian Kinerja Tahun pelaporan	✓	✓		f
	c. Rencana Kerja/Renja Tahun Pelaporan	✓	✓		f
	d. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	✓	✓		f
	e. Rekap Laporan Konsolidasi Tahun Pelaporan	✓	✓		f

Kepala Bagian Organisasi,

Sisca Maya Crenata, S.STP, M.H
Pembina / Iva
Nip. 198509052003122001

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)**



**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KOTA TARA KAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2024 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Teknis penyusunan LKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Etika dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan tahun 2024 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumberdaya Aparatur dan Isu Strategis.

Bab II Perencanaan Kinerja, memuat Visi, Misi Kepala Daerah, Tujuan Organisasi Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama.

Bab III Akuntabilitas Kinerja memuat Pengukuran Kinerja, analisis Pengukuran Kinerja, analisis Efisiensi Penggunaan anggaran dan Penghargaan.

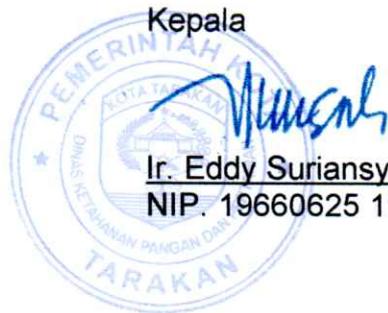
Bab IV Penutup

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat organisasi perangkat daerah dalam penyusunan LKIP dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pertanian daerah selama tahun 2024. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho-Nya, sehingga upaya mewujudkan Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City dapat lebih cepat tercapai.

Wassalamu`alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Tarakan, Januari 2024

Kepala



Ir. Eddy Suriansyah, M.Si

NIP. 19660625 199803 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2024 merupakan tahun ke 5 (lima) dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024, terdapat 5 sasaran(lima) dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja tahun ke lima Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2019 – 2024 berdasarkan pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar 108%. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 14.359.475.863,-. Dengan realisasi anggaran Rp. 14.149.073.843,- atau 98,53%. Dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Hasil analisa pencapaian indikator sasaran terhadap 5 (lima) sasaran dan 17 (tujuh belas) indikator sasaran diketahui bahwa rata – rata capaian kinerja tahun 2024 mencapai 108% atau bermakna sangat baik.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta

optimalisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan sebagai bagian dari upaya pembangunan pertanian Kota Tarakan sekarang dan masa yang akan datang.

Tim Penyusun LKIP
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Tarakan
Tahun 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I - 1
B. Kedudukan dan Susunan Organisasi	I - 2
C. Aparat Pemerintah	I - 5
D. Aset	I - 7
E. Isu Strategis	I - 35
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi dan Misi Kota Tarakan	II - 38
B. Tujuan dan Sasaran	II - 39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	III - 59
B. Analisis Pengukuran Kinerja	III - 62
C. Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran	III - 72
D. Analisis Efisiensi Sumber Daya	III - 75
E. Analisis	III - 82
BAB IV KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	IV - 155
B. Tindak Lanjut Rekomendasi	IV - 155

DAFTAR TABEL

1.1	Data ASN dan Non ASN	I - 5
2.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran	II - 42
2.2	Perjanjian Kinerja	II - 47
2.3	Program dan Anggaran	II - 48
2.4	Perjanjian Kinerja	II - 50
2.5	Indikator Kinerja Utama	II - 55
3.1	Capaian Kinerja	III - 60
3.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja	III - 61
3.3	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas	III - 64
3.4	Perbandingan Capaian Kinerja	III - 65
3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja	III - 65
3.6	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	III - 70
3.7	Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran	III - 73
3.8	Capaian Indikator Kinerja	III - 76
3.9	Perbandingan Capaian Kinerja	III - 76
3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja	III - 77
3.11	Analisa Efisiensi Pengguna Anggaran	III - 81
3.12	Capaian Indikator Kinerja Penyumbang Inflasi	III - 82
3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya	III - 83
3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Akhir Renstra	III - 83
3.15	Analisa Efisiensi Pengguna Anggaran	III - 87
3.16	Capaian Indikator Kinerja Peningkatan skor PPH	III - 89
3.17	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya	III - 89
3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Akhir Renstra	III - 90
3.19	Analisa Efisiensi Pengguna Anggaran	III - 94
3.20	Capaian Penanganan Daerah Rawan Pangan	III - 95
3.21	Perbandingan Capaian Kinerja Penanganan Daerah Rawan	III - 96
3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Akhir Renstra	III - 97
3.23	Analisa Efisiensi Pengguna Anggaran	III - 100
3.24	Capaian Penanganan Keamanan Pangan	III - 101
3.25	Perbandingan Capaian Kinerja Keamanan Pangan	III - 102
3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Akhir Renstra	III - 102
3.27	Analisa Efisiensi Pengguna Anggaran	III - 106

3.28	Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian	III - 108
3.29	Perbandingan Capaian Kinerja	III - 109
3.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Akhir Renstra	III - 110
3.31	Analisa Efisiensi Pengguna Anggaran	III - 120
3.32	Capaian Sasaran Meningkatnya Hasil Produksi Pertanian	III - 122
3.33	Perbandingan Capaian Kinerja	III - 122
3.34	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Akhir Renstra	III - 123
3.35	Analisa Efisiensi Pengguna Anggaran	III - 132
3.36	Capaian Sasaran Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus	III - 134
3.37	Perbandingan Capaian Kinerja	III - 135
3.38	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Akhir Renstra	III - 136
3.39	Analisa Efisiensi Pengguna Anggaran	III - 142
3.40	Capaian Indikator Kinerja Surat Rekomendasi	III - 144
3.41	Perbandingan Capaian Kinerja	III - 145
3.42	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Akhir Renstra	III - 145
3.43	Analisa Efisiensi Pengguna Anggaran	III - 151
3.44	Perbandingan Anggaran	III - 153
3.45	Anggaran Dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi	III - 154

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Perkembangan Pertanian
2. Data Populasi Ternak
3. Rencana Aksi
4. RFK
5. Matriks Tindak Lanjut LHE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selaku unsur pembantu Kepala Daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian, dalam menyelenggarakan SAKIP telah

menyusun dan menetapkan : (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2020-2024; (2) Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024, dan (3) Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2024 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

B. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan dalam Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja berdasarkan kepada Peraturan Walikota Tarakan Nomor : 57 Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Tugas

Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang diberikan kepada daerah.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan mempunyai fungsi sebagai berikut:

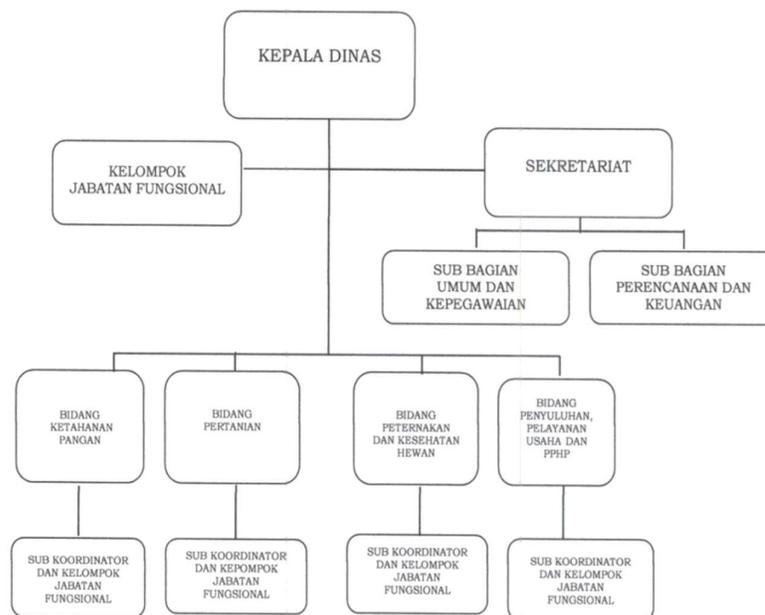
1. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP;
4. Pelaksanaan administrasi dinas ; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 57 Tahun 2021, seperti yang tertera di bawah ini :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu :
 1. Sekretariat
 2. Bidang Ketahanan Pangan
 3. Bidang Pertanian
 4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP
 6. Kelompok Jabatan Fungsional

- b.1 Sekretariat : b.1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.1.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b.2 Bidang Ketahanan Pangan : b.2.1 Sub Koodinator Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan
b.2.2 Sub Koodinator Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- b.3 Bidang Pertanian : b.3.1 Sub Koodinator Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
b.3.2 Sub Koodinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
- b.4 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan : b.4.1 Sub Koodinator Produksi Ternak
b.4.2 Sub Koodinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- b.5 Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP : b.5.1 Sub Koodinator Penyuluhan
b.5.2 Sub Koodinator Pelayanan Usaha dan PPHP



C. Aparat Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.

Sumber Daya Perangkat Daerah (Sumber Daya Manusia)

Susunan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan per 31 Desember 2024 sebanyak 75 orang dengan jumlah PNS 44 orang, Non PNS Daerah 31 orang.

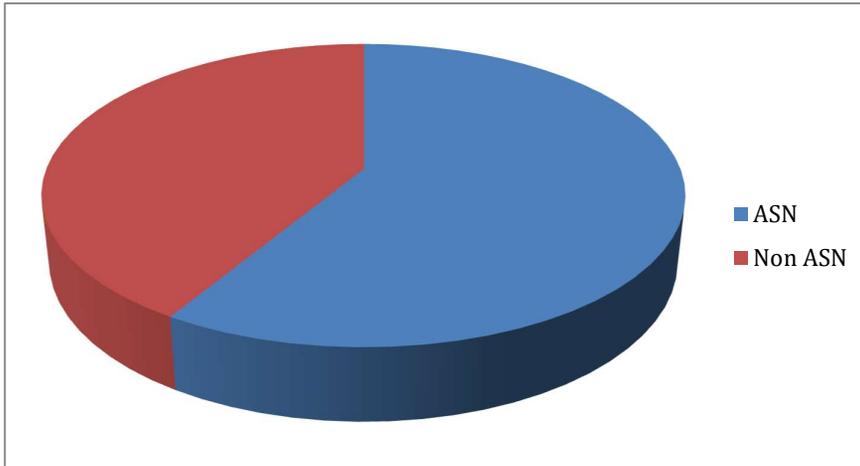
Berdasarkan analisis beban kerja dan dibandingkan dengan banyaknya jumlah pegawai, jumlah SDM tersebut sudah cukup memadai. Namun ditinjau dari kualitas SDM masih diperlukan peningkatan pendidikan dan keahlian serta keterampilan pegawai melalui pelatihan dan pendidikan formal yang sesuai dengan bidang kerja masing–masing pegawai.

Tabel 1.1 Data ASN Dan Non ASN Di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Per 31 Desember 2024

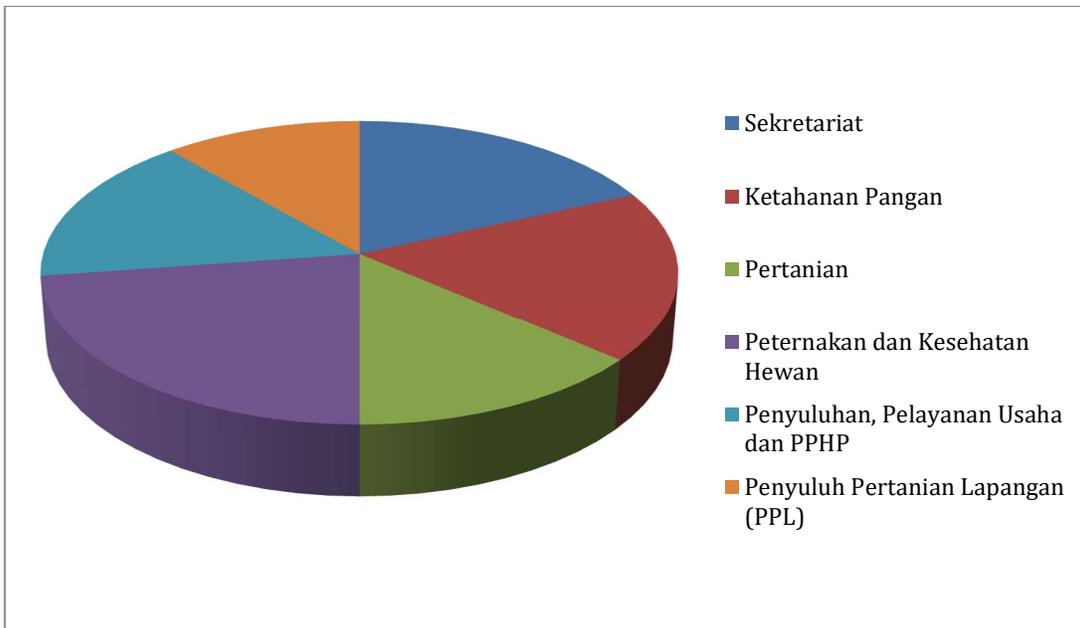
NO	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH ASN	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH NON ASN
					SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	8	7	1	-	1	-	-	4	3	-	4
2	Bidang Ketahanan Pangan	8	2	6	-	-	1	-	4	3	-	2
3	Bidang Pertanian	6	3	3	-	-	-	1	4	1	-	10
4	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	10	8	2	-	1	-	-	5	4	-	9
5	Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP	7	5	2	-	-	2	-	4	1	-	3
6	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	5	2	3	-	-	-	-	4	1	-	3
TOTAL ASN		44	27	17	0	2	3	1	25	13	0	
TOTAL NON ASN												31
TOTAL ASN dan NON ASN		76										

Sumber : Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

Grafik 1.1 Perbandingan Pegawai



Grafik 1.2 Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai Antar Bidang



D. Aset

**DAFTAR BMD PADA PENGGUNA BARANG
ASET TETAP LAINNYA
INTRAKOMPTABEL
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2024.**

FORMA II 0.2.5

Pengguna Barang : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kode Lokasi : 08.00.00

Kode Barang		Nama Barang		NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Lokasi	Jumlah	Satuan	Rangs Satuan Perolehan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	3	3							8			66.235.306,00				
1	3	3							1			6.830.000,00				
1	3	3	04	04					1			6.830.000,00				
1	3	3	04	04	01	01			1			6.830.000,00				
1	3	3	04	01	01	01	01	01	1	Buah	6.830.000,00	6.830.000,00	Pengadaan APBD	17/11/2009	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah peraturan perundangan 1080 016025000001
1	3	3	04						7			99.405.500,00				
1	3	3	04	02					7			99.405.500,00				
1	3	3	04	02	01				7			99.405.500,00				
1	3	3	04	02	01	005			1	Buah	8.486.500,00	8.486.500,00	Pengadaan APBD	19/03/2012	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1101001001500000
1	3	3	04	02	01	005			1	Buah	8.486.500,00	8.486.500,00	Pengadaan APBD	19/03/2012	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1101001001500000
1	3	3	04	02	01	005			1	Buah	8.486.500,00	8.486.500,00	Pengadaan APBD	19/03/2012	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1101001001500000
1	3	3	04	02	01	005			1	Buah	8.486.500,00	8.486.500,00	Pengadaan APBD	19/03/2012	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1101001001500000
1	3	3	04	02	01	005			1	Buah	8.486.500,00	8.486.500,00	Pengadaan APBD	19/03/2012	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1101001001500000
1	3	3	04	02	01	005			1	Buah	8.486.500,00	8.486.500,00	Pengadaan APBD	19/03/2012	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1101001001500000

Tarakan, 24 Januari 2025
Pengguna Barang



1/24/25

PMK : 1

**DAFTAR BMD PADA PENGGUNA BARANG
ASET TAK BERWUJUD
INTRAKOMPTABEL
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2024**

FORMIR 4.0.2.8

Pengguna Barang : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kode Lokasi : 09.00.00

Kode Barang		Penggolongan dan Kodeifikasi Barang		NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Nilai Perolehan Rp.	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	5	3							2			89.386.000,00				
									2			89.386.000,00				
1	5	3	01	01					2			89.386.000,00				
1	5	3	01	01	05				2			89.386.000,00				
1	5	3	01	01	05	001			1	Paket	56.308.000,00	56.109.000,00	Pengadaan APBD	19/12/2012	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	_11010010016000001
1	5	3	01	01	05	001			1	Paket	33.286.000,00	33.286.000,00	Pengadaan APBD	17/09/2013	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	_11010010016000001

Tarakan, 24 Januari 2025
Pengguna Barang



U. Rizky Sulhanawati, M.Si.
NIP. 199609251988031001

DAFTAR BMD PADA PENGGUNA BARANG
ASET LAIN-LAIN
INTRAKOMPITABEL
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHLIN 2024

Pengguna Barang : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kode Loker : 00.00.00

Penggolongan dan KodeRusak Barang		NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Lokasi	Kendaraan (Gitar*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan Rp.	Nilai Perolehan Rp.	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Kot
Kode Barang	Nama Barang						Merah Putih	Nomor Bangsa	Nomor BPFEB								
1	5	4	01	01						11	12	23	24	15	16	17	18
										1			224.000.000,00				
										1			224.000.000,00				
										1			224.000.000,00				
										1			224.000.000,00				
1	5	4	01	01	01					1	M2	224.000.000,00	224.000.000,00	Habit	15/12/1998	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rakun Ka aset lainnya tidak termasuk dengan PRAK. KIRPA 025.790/PRA.01.01998. 201-02.1098/180/001/2012/000000

Tarakan, 24 Januari 2025
Pengguna Barang

W. Rudy Suriansyah, M.Hi.
NIP. 70500362511984031001

E. ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TARAKAN

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Belum tercapai target skor PPH
2. Belum terjaminnya mutu keamanan pangan segar yang beredar
3. Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan terhadap Pentingnya Keamanan Pangan Segar
4. Tidak tersedianya data yang akurat
5. Kurangnya Koordinasi Distribusi Pangan Antar Wilayah
6. Adanya Bahan Pangan yang Menyebabkan Inflasi Akibat Kondisi Tertentu
7. Berkurangnya Luas lahan pertanian
8. Tingginya penggunaan pupuk dan pestisida kimia pada lahan pertanian
9. Tingginya biaya upah tenaga kerja pertanian
10. Tingginya serangan Hama dan Penyakit Tanaman
11. Ketersediaan infrastruktur pertanian belum sepenuhnya dalam kondisi baik (JUT, Irigasi, Embung Pertanian)
12. Perkembangan populasi ternak masih rendah
13. Produktifitas ternak unggas masih rendah
14. Ditemukan kasus gangguan reproduksi pada ternak
15. Masih Ditemukan Kasus Penyakit Hewan

16. Masih Ditemukan Hasil pengujian laboratorium yang menunjukkan tingkat pencemaran yang tinggi
17. Kesadaran masyarakat peternak terhadap kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner masih rendah.
18. Teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner belum diterapkan secara optimal
19. Masih ditemukan kejadian penyakit penyakit hewan dan penyakit zoonosis
20. Banyaknya permintaan pelayanan kesehatan hewan kesayangan yang belum tertangani
21. Luasnya Cakupan Wilayah Pelayanan kesehatan hewan
22. Rendahnya pengajuan permohonan persetujuan pengeluaran dan pemasukan hewan dan atau bahan hewan
23. Pendapatan petani masih rendah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan telah melalui tahapan secara simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan merupakan bagian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tarakan. Selanjutnya, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan dimuat program dan kegiatan prioritas serta sub kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

i. Visi Kota Tarakan

Visi Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 adalah :

“ Terwujudnya Kota Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City”

ii. Misi – Misi Kota Tarakan :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Terampil, Mandiri, Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efisien yang Berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Rakyat;
3. Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Publik yang Cepat, Mudah, Murah, Adil dan Transparan;
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang Berorientasi kepada Kepentingan Rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata dan Pertanian dalam arti luas;
5. Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber Daya alam melalui Peningkatan Nilai Tambah yang Berwawasan Lingkungan dengan Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, Kreatif dan Inovatif Berbasis Ilmu Pengetahuan;

6. Meningkatkan Pembangunan Akhlak dan Moral sesuai Kearifan Lokal serta Mewujudkan Kepastian Hukum dan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

Berdasarkan Tugas dan Fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan mendukung dalam pencapaian :

1. Misi ke 2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif dan Effisien yang Berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Rakyat; dengan Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.
2. Misi ke 4 : Mengembangkan ekonomi daerah yang Berorientasi kepada Kepentingan Rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata dan Pertanian dalam arti luas, dengan Sasaran 14 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Sasaran 15 : Terkendalinya Inflasi Daerah.

iii. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran yang merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan.

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan sasaran : meningkatnya akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2. Mewujudkan Ketahanan Pangan;

dengan indikator : kecukupan bahan pangan;

sasaran : terjaminnya ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan

3. Menjaga Stabilitas Inflasi Sektor Bahan Pangan;

dengan indikator : inflasi bahan pangan;

sasaran : terjaganya ketersediaan bahan makanan penyumbang inflasi

4. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB;

dengan indikator : kontribusi sub-sektor pertanian terhadap PDRB;

sasaran : meningkatnya produksi hasil pertanian dan peternakan

5. Meningkatnya Pendapatan Petani;

dengan indikator : cakupan waktu penyuluhan dan Pelayanan Usaha Pertanian ;

sasaran : penyuluhan dan pelayanan usaha pertanian.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis *SMART* digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Adapun sasaran – sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah :

1. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

2. Sasaran : Terjaganya ketersediaan bahan makanan penyumbang inflasi
3. Sasaran : Tercapainya Target Pola konsumsi Pangan Masyarakat dan Pengawasan Pangan Segar
4. Sasaran : Meningkatnya Produksi hasil Pertanian
5. Sasaran : Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelayanan Usaha Pertanian

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target Kinerja sasaran					Target Akhir (2024)
								2020	2021	2022	2023	2024	
MISI II : MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH, PROFESIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN DAN BERBASIS PADA SISTEM PENGANGGARAN YANG PRO RAKYAT													
	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan		Sasaran 4 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Persentase Layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi					97	97	97	97,97	
				Nilai / Predikat SAKIP					67,5	67,75	67,85	68	

MISI IV : MENGEMBANGKAN EKONOMI DAERAH YANG BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN RAKYAT (EKONOMI PRO RAKYAT) MELALUI SEKTOR PERDAGANGAN, JASA, INDUSTRI, PARIWISATA DAN PERTANIAN DALAM ARTI LUAS														
SASARAN 4 RPJMD : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH														
No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target Kinerja sasaran					Target Akhir Tahun (2024)	
								2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan		1.Sasaran 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	1.Persentase Layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	Realisasi target layanan perangkat daerah yang terealisasi / target layanan perangkat daerah	%	97	97	97	97	97	97	97	97
				2. Nilai / Predikat SAKIP	Nilai lhE	Nilai	-	67	67,5	67,75	67,85	68	68	68
2..	Terjaganya Ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi	Inflasi bahan pangan	2.Terjaganya ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.Persentase Ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan	Realisasi prasarana pendukung kemandirian pangan yang dibutuhkan / target prasarana pendukung kemandirian pangan	%	0	-	-	-	33	33	33	33

				4.Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan terhadap bahan pangan penyumbang inflasi	Realisasi ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi / kebutuhan bahan pangan penyumbang inflasi pada waktu tertentu	%	112	112	113	114	115	116	116
3..	Tercapainya Target Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dan		3.Tercapainya Target Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dan Pengawasan Pangan Segar	5.Peningkatan Skor PPH	Skor PPH = Skor PPH Kelompok Padi-padian + Skor PPH Umbi-umbian + Skor PPH kelompok lainnya	Skor PPH	80,6	82,3	83	84	85	81	90
				6. Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Daerah rawan pangan yang tertangani / jumlah daerah rawan pangan	%	-	-	-	-	100	95	
				7.Persentase Keamanan Pangan yang dilaksanakan	Pengujian keamanan pangan yang dilaksanakan / jumlah uji yang ada	%	-	-	-	-	100	95	
4.	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi sub-sektor pertanian terhadap PDRB	4.Meningkatnya Produksi Pertanian	8. Jumlah produksi hasil pertanian	Jumlah produksi hasil pertanian/tahun	Ton	61.222,9	68.173,1	70.704	72.686,5	75.061,5	77.645,6	Produksi hasil pertanian
				9.Produktifitas Pertanian (padi) (ton/Ha)	Jumlah produksi padi / Ha	Ton / ha		4,0	4,1	4,5	4,8	4,1	

				10. Jumlah produksi daging (daging)	Jumlah produksi daging/tahun	Kg	7.890.179 daging	7,199,92 daging	7.180.520 daging	7.781.380 daging	7.850.000 daging	7.898.179 daging	Produksi hasil peternakan
				11. Jumlah produksi hasil peternakan telur	Jumlah produksi hasil peternakan/tahun	Kg	3.071.082 telur	775,387.5 telur	775.389 telur	1.050.000 telur	2.000.000 telur	2.100.000 telur	Produksi hasil peternakan
				12. Produktifitas Ayam Potong (%)	Jumlah pakan yang dibutuhkan / penambahan berat badan							1,83	
				13. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	Jumlah kasus penyakit hewan menular yang tertangani / jumlah kasus hewan menular yang terjadi						8,3	9,1	
				14. Cakupan waktu pelayanan kesehatan hewan masyarakat veteriner (bulan/tahun)	Jumlah bulan pelayanan / 12 bulan	Bln	12	12	12	12	12	12	
5.	Peningkatan Pendapatan Petani Miskin	Pendapatan petani	5. Terselenggara Penyuluhan dan Pelayanan Usaha Pertanian	15. Persentase surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (tahun)	Jumlah usulan surat rekomendasi yang diajukan / jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan	%		100	100	100	95	95	
				16. Cakupan waktu penyuluhan pertanian (bulan/ tahun)	Jumlah bulan pelayanan / 12 bulan	bulan		12	12	12	12	12	

				17.Peningkatan Kelembagaan Petani (kelompok)	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya	kelompok		-	-	26	5	5	
--	--	--	--	--	---	----------	--	---	---	----	---	---	--

b. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Dokumen RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024, Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan (RENJA) Tahun 2024 dan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2024 diuraikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	97%
		2	Nilai / predikat SAKIP	68
2	Terjaganya ketersediaan bahan makanan penyumbang inflasi	3	Persentase ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan	33
		4	Persentase ketersediaan dan kebutuhan terhadap bahan pangan penyumbang inflasi	116
3	Tercapainya Target Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dan Pengawasan Pangan Segar	5	Peningkatan skor PPH (pola pangan harapan)	81
		6	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	95%
		7	Persentase keamanan pangan yang dilaksanakan	95%
4	Meningkatnya produksi pertanian	8	Produksi Hasil Pertanian (ton)	77.645,6
		9	Produktifitas Pertanian (padi) (ton/Ha)	4,1
		10	Produksi daging (kg)	7.898.179
		11	Produksi telur (kg)	1.483.000
		12	Produktifitas Ayam Potong (%)	1,83
		13	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	9,1
		14	Cakupan waktu pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (bulan/tahun)	12
5	Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelayanan Usaha Pertanian	15	Persentase surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan %/tahun	95%
		16	Cakupan Waktu Penyuluhan Pertanian (bulan/tahun)	12

	17	Peningkatan Kelembagaan Petani (kelompok)	5
--	----	---	---

Untuk mencapai target - target tersebut, dilaksanakan program – program pada table 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 : Program dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024.

	Program	Anggaran	Keterangan	
Program Prioritas				
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan		11.939.360	APBD
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	222.427.290	APBD
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan		40.515.670	APBD
	Program Pengawasan Keamanan Pangan		52.404.230	APBD
4.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	4.849.338.320	APBD
5.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	1.237.674.060	APBD
6.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	165.900.770	APBD
7.	Perizinan Usaha Pertanian	Rp.	13.294.000	
8.	Penyuluhan Pertanian	Rp.	956.972.380	APBD
	Jumlah	Rp.	7.509.464.080	APBD
Program Pendukung				
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	6.809.009.783	APBD
Total		Rp.	14.359.475.863	

Untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis yang terdiri atas 17 (tujuh belas) indikator kinerja sasaran di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan diatas, maka dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program kerja dan 26 (dua puluh enam) kegiatan serta 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.14.359.475.863,- (empat belas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

Adapun program kerja tersebut tertuang pada tabel 2.4, sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja

**PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
TAHUN 2024 KOTA TARAKAN**

a. Program Prioritas

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024		BAGIAN/ BIDANG
		OUTCOME / OUTPUT	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran 1 : Terjaganya ketersediaan bahan makanan penyumbang inflasi				
		Persentase ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan	33%		Ketahanan Pangan
	1.1 Program Pengelolaan sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				
	1.1.1 Kegiatan Penyediaan seluruh pendukung kemandirian pangansesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	1.1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah baran yang diserahkan kepada masyarakat	7 jenis	11.939.360	
		Persentase ketersediaan dan kebutuhan terhadap bahan pangan penyumbang inflasi	116		Ketahanan Pangan
	1.2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan PanganMasyarakat				
	1.2.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan Harga Pangan				
	1.2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	Jumlah barang bazaar yang diserahkan kepada masyarakat	5 jenis	75.364.070	
	1.2.1.2 Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stock , pasokan dan dan harga pangan pokokstrategis	Jumlah barang bazaar yang diserahkan kepada masyarakat	2 jenis	24.707.590	
2	Sasaran 2: Tercapainya Target Pola Konsumsi Pangan Masarakat dan Pengawasan Pangan Segar				
		Peningkatan Skor PPH	81		Ketahanan Pangan
	2.1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan PanganMasyarakat				
	2.1.1. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				
	2.1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Sosialisas Pola Konsumsi Pangan berbasis B2SA		5.008.440	
	2.1.1.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeka Ragamaan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sosialisasi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal		117.347.190	
		Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	95		Ketahanan Pangan
	2.2 Program Penanganan Kerawanan Pangan				
	2.2.1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan KetahananPangan Kecamatan				
	2.2.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen SFVA	1 dokumen	19.929.750	
	2.3 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan PanganMasyarakat				
	2.3.1 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kta				
	2.3.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan, Pengadaan, dan penyaluran cadangan pangan pada Krawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah/Kota	Beras Cadangan Pangan Daerah	1.510 kg	20.585.920	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024		BAGIAN/ BIDANG
		OUTCOME / OUTPUT	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	
		Persentase Keamanan Pangan yang dilaksanakan	95		Ketahanan Pangan
	2.3 Program Pengawasan Keamanan Pangan				
	2.3.1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota				
	2.3.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan segar asal tumbuhan	Uji Residu Pestisida pada sayuran	1 jenis	27.448.350	
	2.3.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Koordinasi mutu dan keamanan pangan asal tumbuhan	2 kali	24.955.880	
3.	Sasaran 3 : Meningkatnya produksi pertanian				
		Produksi pertanian (ton)	77.645,6		Pertanian
		Produktifitas Pertanian	4,1		Pertanian
	3.1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
	3.1.1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				
	3.1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah sarana prasarana pertanian yang dihibahkan	4 jenis	3.738.315.300	
	3.1.1.2 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana prasarana pertanian yang dihibahkan	3 jenis	279.995.500	
	3.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
	3.2.1 Kegiatan Prasarana Pertanian				
	3.2.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Peta LPPB	1 peta	28.264.060	
		Jumlah produksi Peternakan (kg)	9.376.179		PKH
		Produktifitas Ayam Potong	1,83		PKH
	3.3 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
	3.1.1 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota				
	3.3.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG hewan/tanaman	Pakan ayam Nunukan	1.566 kg	25.009.020	
	3.3.2 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam daerah Kabupaten/Kota				
	3.3.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan /pakan benih/bibit hijauan Pakan Ternak	Uji sampel pakan	12 sampel	10.000.000	
	3.3.3 Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di tingkat Pengecer				
	3.3.3.1 Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Pemeriksaan hewan qurban	1 kali	10.000.000	
	3.3.4 Kegiatan Penyediaan Benih, Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam satu daerah Kabupaten/Kota				
	3.3.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten Kota Lain	Penanaman Bibit HMT	1.835 batang	37.346.750	
	3.3.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah lain	DOC ayam Nunukan, ayam kampung super dan sapi bibit potong	3 jenis	748.671.750	
	2. Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan surat layanan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan			
	3.4.1 Kegiatan Penertiban Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan waktu pemberian rekomendasi izin usaha			

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024		BAGIAN/ BIDANG
		OUTCOME / OUTPUT	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	
	3.4.1.1 Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Sosialisasi persyaratan izin usaha	1 kali	5.002.000	
	3.4.1.2 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standard an Izin Usaha Pertanian	Pengawasan penerapan standardan izin usaha pertanian	2 kali	5.042.000	
	3.4.2 Kegiatan Izin Usaha Pengecer (took, retail, distributor) obat Hewan				
	3.4.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah rompi petugas pengawasan	13 lembar	3.250.000	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	9,1		PKH
	3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
	3.3.1 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Penutupan dan Pembukaan daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				
	3.3.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada hewan	Jumlah pemeriksaan laboratorium	4 jenis penyakit	25.000.000	
	3.3.2 Kegiatan Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan daerah kabupaten/Kota				
	3.3.2.1 Sub Kegiatan Analisis Resiko Penyakit Hewan zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Bimtek juru sembelih	1 kali	4.999.870	
	3.4.3 Kegiatan Pengelolaan PelayananJasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	3.4.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Uji borax	5 jenis	19.997.000	
	3.4.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan jasa Medik Veteriner	Bahan, alat dan obat kesehatan hewan	3 jenis	105.003.900	
	3.4.4 Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				
	3.4.4.1 Sub Kegiatan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Sarana pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	2 jenis	10.900.000	
4	Sasaran 4 : Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelayanan Usaha Pertanian				
		Persentase surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan %/tahun	95%		Bina Usaha dan Penyuluhan
		Cakupan Waktu Penyuluhan Pertanian (bulan/tahun)	12 bulan		Bina Usaha dan Penyuluhan
	4.1 Program Penyuluhan Pertanian				
	4.1.1 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan				
	4.1.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan KapasitasKelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Demplot Pertanian terpadu di kebun contoh	1 unit	315.150.000	
	4.1.1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			641.822.380	
TOTAL Anggaran Prioritas			Rp.7.550.466.080 -		

b. Program Pendukung

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET 2024		BAGIAN/ BIDANG
			KINERJA	KEUANGAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	1.1 Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	44 orang bulan	6.221.036.000	Sekretariat
	1.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan tunjangan adminstrasi keuangan	13 orang bulan	68.736.000	Sekretariat
	1.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	1.2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Disipli Pegawai	Jumlah mesin kehadiran	1 unit	5.000.000	Sekretariat
	1.3 Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah				
	1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponeninstalasi listrik / penerangan	3 jenis	6.002.100	Sekretariat
	1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	60 jenis	40.009.350	Sekretariat
	1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	11.140.220	Sekretariat
	1.3.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat kooedinasi dan konsultasi	12 op	87.676.200	Sekretariat
	1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinath Daerah				
	1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah kursi	30 unit	12.843.900	Sekretariat
	1.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung gedung kantor	13 unit	115.820.170	Sekretariat
	1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Sekretariat
	1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan prangko	2 jenis	968.533	Sekretariat
	1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya air dan Listrik	Cakupan waktu Pembayaran listrik, telpon, air, internet	12 bulan	94.327.310	sekretariat
	1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1.6.1 Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak dan pemeliharaan kendaraan jabatan	1 unit kendaraan roda 4 dan 29 kendaraan roda 2	10.000.000	Sekretariat
	1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pajak dan pemeliharaan kendaraan oprasional	5 unit kendaraan 4 dan 12 unit kendaraan roda 2	120.000.000	Sekretariat
	1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC, lap top, printer yang dipelihara	3 jenis	16.450.000	Sekretariat
TOTAL Anggaran Pendukung				6.809.009.783,-	

4 Indikator Kinerja Utama

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dan acuan pelaksanaan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) menganut prinsip **S.M.A.R.T** yang merupakan singkatan dari *Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-Bounded*. Suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) dianggap telah memenuhi kriteria SMART berdasarkan kesepakatan antara pengelola kinerja organisasi pemilik IKU dan atasan langsung pemilik IKU.

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2019 – 2024, terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang spesifik, dapat diukur, hasil kesepakatan bersama, target dapat dicapai dan adanya batas waktu pencapaian target. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 2. Terjaganya Ketersediaan bahan makanan penyumbang inflasi
 3. Tercapainya target pola konsumsi pangan masyarakat dan pengawasan pangan segar
 4. Meningkatnya produksi hasil pertanian
 5. Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelayanan Usaha Pertanian
- 4.5.1.1.1 dan Pelayanan Usaha Pertanian, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5.

Table 2.5 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	Nilai / predikat SAKIP	Nilai LHE	-	68	Nilai LHE dari Inspektorat	Sekretariat
	2.	Presentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	Realisasi target layanan perangkat daerah yang terealisasi / target layanan perangkat daerah	%	97	Laporan RFK	Sekretariat
2.Terjaganya ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi		-	-	-	-	Data pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan tahun 2024	Bidang Ketahanan Pangan
	3.	Persentase Ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan	Realisasi prasarana pendukung kemandirian pangan yang dibutuhkan / target prasarana pendukung kemandirian pangan		33	Laporan RFK Sub Kegiatan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Bidang Ketahanan Pangan
	4.	Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan terhadap bahan pangan penyumbang inflasi	Realisasi ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi / kebutuhan bahan pangan penyumbang inflasi pada waktu tertentu	%	116		Bidang Ketahanan Pangan
3.Tercapainya Target Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dan Pengawasan Pangan Segar		-	-	-	-	-	-
	5.	Peningkatan Skor PPH	Skor PPH = Skor PPH Kelompok Padi-padian + Skor PPH Umbi-umbian + Skor PPH kelompok lainnya	Skor PPH	86		Bidang Ketahanan Pangan
	6.	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Daerah rawan pangan yang tertangani / jumlah daerah rawan pangan		95		Bidang Ketahanan Pangan

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
	7.	Persentase Keamanan Pangan yang dilaksanakan	Pengujian keamanan pangan yang dilaksanakan / jumlah uji yang ada		95		Bidang Ketahanan Pangan
4. Meningkatnya Produksi Pertanian							
	8.	Jumlah produksi hasil pertanian	Jumlah produksi hasil pertanian/tahun	Ton	77.645,6	Data Perkembangan Pertanian	Bidang Pertanian
	9.	Produktifitas Pertanian (padi) (ton/Ha)	Jumlah produksi padi / Ha		4,1	Data Perkembangan Pertanian	Bidang Pertanian
	10	Jumlah produksi hasil peternakan	Jumlah produksi daging/tahun	Kg	7.898.179 daging	Data Perkembangan Peternakan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	11		Produksi telur /tahun	kg	2.100.000 telur	Data Perkembangan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	12	Produktifitas Ayam Potong (%)	Jumlah pakan yang dibutuhkan / penambahan berat badan		1,83	Data Perkembangan Peternakan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	13	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	Jumlah kasus penyakit hewan menular yang tertangani / jumlah kasus hewan menular yang terjadi		9,1		Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	14	Cakupan waktu pelayanan kesehatan hewan masyarakat veteriner (bulan/tahun)	Jumlah bulan pelayanan / 12 buah		12		Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelayanan Usaha Pertanian							Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	15	Persentase surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (tahun)	Jumlah usulan surat rekomendasi yang diajukan / jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan		95		Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
	16	Cakupan waktu penyuluhan pertanian (bulan/ tahun)	Jumlah bulan pelayanan / 12 bulan		12		Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	17	Peningkatan Kelembagaan Petani (kelompok)	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya		5		Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak - pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dalam beberapa Peraturan di atas, mengamanatkan bahwa Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 - 2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.

Pelaporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2024, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dalam bab ini akan disajikan uraian Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran dan Penghargaan yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target dan capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per-sasaran, realisasi anggaran per-sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan, dengan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100\%$$

Dan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	90 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d <65	Rendah
5	0 s/d <50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

Capaian Indikator Kinerja Utama :

Hasil pengukuran kinerja dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ditampilkan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.					
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	97	99,97	103
	2.	Nilai / predikat SAKIP	68	65,2	95
2. Terjaganya ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi		-	-		
	3.	Persentase Ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan	33	33	100
	4.	Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan terhadap bahan pangan penyumbang inflasi	116	181,73	156
3. Tercapainya Target Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dan Pengawasan Pangan Segar		-	-	-	-
	5.	Peningkatan Skor PPH	81	77,7	95
	6.	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	95	96	101
	7.	Persentase Keamanan Pangan yang dilaksanakan	95	105	110
4. Meningkatnya Produksi Pertanian					
	8.	Jumlah produksi hasil pertanian	77.645,6	89.587,8	115
	9.	Produktifitas Pertanian (padi) (ton/Ha)	4,1	4,38	106
	10.	Jumlah produksi hasil peternakan (kg)	7.898.179 daging	7.917.817	100

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
	11.		1.483.000 telur	1.768.758	110
	12.	Produktifitas Ayam Potong (%)	1,83	1,83	100
	13.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	9,1	10,78	118
	14.	Cakupan waktu pelayanan kesehatan hewan masyarakat veteriner (bulan/tahun)	12	12	100
5. Terselenggara nya Penyuluhan dan Pelayanan Usaha Pertanian					
	15.	Persentase surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan %	95	96	101
	16.	Cakupan waktu penyuluhan pertanian (bulan/ tahun)	12	12	100
	17.	Peningkatan Kelembagaan Petani (kelompok)	5	6	120
Capaian Kinerja					1.834/17 = 107,9

Pada tabel 3.1 dinyatakan bahwa Capaian Kinerja 5 sasaran dengan 17 indikator tersebut 107,9% , sedangkan predikat kinerjanya dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran
1	90 ≤ 100	Sangat Tinggi	5
2	76 s/d <90	Tinggi	0
3	66 s/d <75	Sedang	0
4	51 s/d <65	Rendah	0
5	0 s/d <50	Sangat Rendah	0
Total Sasaran			5

Pada tabel Nilai Peringkat Kinerja, bahwa nilai $90 \leq 100$ berpredikat kinerja sangat tinggi. Dengan Capaian Kinerja 108%, jadi predikat nilai capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 masuk kategori **“Sangat Tinggi”**.

B. Analisis Pengukuran Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Indikator 1 : Nilai / Predikat SAKIP

SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah menerapkan SAKIP sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program, kegiatan dan sub kegiatan.

Capaian Peningkatan SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pencapaian kinerja sasaran strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan indikator Nilai / predikat SAKIP , dengan penjelasan, sebagai berikut :

Sasaran ini diukur dengan indikator Nilai / Predikat SAKIP yang secara operasional di koordinasikan oleh Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.

Adapun aspek - aspek yang dinilai dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP meliputi :

1. Perencanaan Kinerja
2. Perjanjian Kinerja
3. Pengukuran Kinerja
4. Pengelolaan Data Kinerja
5. Pelaporan Kinerja
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Pada indikator Nilai / Predikat SAKIP terdapat 1 program, 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan pendukung dalam mencapai sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan kegiatan :

- (1) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah,
- (2) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah,
- (3) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah,
- (4) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan
- (5) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dan melalui sub kegiatan;

- (1) penyediaan gaji dan tunjangan ASN,
- (2) penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN,
- (3) penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
- (4) penyediaan bahan logistic kantor,
- (5) penyediaan barang cetakan dan penggandaan,
- (6) penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD,
- (7) penyediaan jasa surat menyurat,
- (8) penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik,
- (9) penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya,
- (10) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan,
- (11) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan oprasional atau lapangan.

Secara keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2024 dapat terlaksana. Dalam mencapai

indikator sasaran maka diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Nilai}}{\text{predikat SAKIP}}$$

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja pada tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Nilai / Predikat SAKIP dinas pada tahun 2024 belum ada nilainya, karena baru akan dinilai pada tahun 2025.

Pencapaian Kinerja sasaran strategis 1 (satu) Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diukur dengan menggunakan indikator Nilai / predikat SAKIP dan Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (table 3.3) :

Tabel 3.3: Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Nilai /predikat SAKIP	-	68	65,2	95
Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	-	97	99,97	103
				198 / 2 =99%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya.

Capaian Kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun – tahun sebelumnya, belum bisa diperbandingkan, karena Nilai / Predikat SAKIP tahun 2024 baru dinilai pada tahun 2025.

Tabel 3.4: Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun - tahun sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai /predikat SAKIP	-	95	95	95	106	65,2*
Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi		100	100	100	100	99,97

*) adalah nilai tahun 2023

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan dengan target akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian periode 2019 – 2024, maka realisasi indicator kinerja tahun 2024 belum bisa diperbandingkan karena belum ada Nilai / Predikat SAKIP tahun 2024, akan tetapi kalau diperbandingkan dengan realisasi tahun 2023, sudah melebihi target Renstra, target Renstra 68, realisasi tahun 2023 adalah 72,05. Untuk layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi sudah tercapai sesuai target akhir Renstra.

Tabel 3.5: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024
		Target	Realisasi	Capaian	
Nilai / predikat SAKIP	-	68	65,2*	95	68
Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	-	97	99,97	103	97

d. Analisa Penyebab Keberhasilan /kegagalan /Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Secara keseluruhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2024.

Faktor – faktor penting yang mempengaruhi peningkatan/penurunan indikator kinerja Nilai / Predikat SAKIP : dan layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi :

1. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing - masing;.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan sudah tersusun di dalam RKA dan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024;
3. Terdapat target kinerja sasaran yang sudah tercapai pada tahun-tahun sebelumnya;
4. Pelaksanaan pelaporan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu;
5. Dilaksanakannya pemeriksaan reguler oleh BPK dan Inspektorat Kota Tarakan;
6. Masih terdapat sisa anggaran karena sisa atau selisih harga dengan SSH yang ada.

e. Perbaikan dan Tindak Lanjut.

Terhadap permasalahan yang ditemukan diatas, Dinas Ketahanan dan Pertanian telah melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan kegiatan yang telah disampaikan kepada kepala dinas yang dilaporkan secara berjenjang dari PPTK dan kepala bidang;
2. Dilaksanakan rapat evaluasi terhadap laporan konsolidasi fisik dan keuangan serta laporan pengendalian dan evaluasi dibandingkan dengan rencana aksi,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran, target fisik dan target keuangan, dan target – target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan serta solusi terhadap kendala – kendala yang dialami.

3. Mengimplementasikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun.

f. Analisa Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050 Tahun 2020 yang didalamnya didukung dengan 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Penyerapan anggaran Rp. 6.809.009.783,- dengan 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan :

1). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan penyerapan anggaran 6.137.463.395,

2). Sub Kegiatan Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN, dengan penyerapan anggaran 68.736.000,-

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah dengan 4 (empat) sub kegiatan ;

1). Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor dengan penyerapan anggaran Rp,4.025.450,-,

2). Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor dengan penyerapan anggaran Rp. 34.923.010,-,

3). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan

penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.243.260,-

4). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD dengan penyerapan anggaran Rp. 85.316.354,-

3. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 1 (satu) sub kegiatan ;

1). Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan penyerapan anggaran 12.840.000,-

2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 113.160.000,-.

4. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan:

1). Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat, dengan penyerapan anggaran 798.500,-

2). Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan penyerapan anggaran 84.373.356,-

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan:

1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan penyerapan anggaran 6.507.400

2). Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 114.825.170,-.

3). Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan, dengan penyerapan anggaran 16.409.000,-

Output kegiatan Laporan Capaian Kinerja sebagai berikut ;

1. Dokumen Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran
2. BKU Bendahara Pengeluaran
3. BKU Pembantu Bendahara Penerimaan
4. Dokumen Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6. Laporan Konsolidasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
7. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Tri Wulan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
8. Dokumen Laporan Kinerja Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

g. Rekomendasi dan Tindak Lanjut SAKIP

1. Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 belum dievaluasi oleh Inspektorat.
2. Dalam rangka transparansi anggaran daerah maka dokumen Renstra dan PK yang sudah selesai disusun agar segera dipublikasikan.
3. Dokumen Renstra harus direviu secara berkala.
4. Hasil pengukuran kinerja agar dapat dimanfaatkan dalam pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
5. Dalam rangka transparansi anggaran daerah maka dokumen IKU yang sudah selesai disusun agar segera dipublikasikan.
6. Laporan kinerja agar menyajikan informasi tentang analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

7. Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hambatannya.

8. Supervisi perlu dilakukan terhadap LAKIP melalui pembahasan – pembahasan regular dan bertahap serta didokumentasikan.

h. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang dilakukan pada tahun 2024

Tindak lanjut atas rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi disajikan pada tabel

3.6 berikut :

Tabel 3.6 : Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi / Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Progres Penyelesaian
1.	Terdapat Renstra perubahan namun belum direviu secara berkala	Reviu dokumen Renstra hanya dilakukan apabila RPJMD dilakukan reviu, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan Perubahan pada tahun 2021.	-	Pada 2021 (November 2021)	Sekretaris	Sudah selesai
2.	Melakukan reviu IKU secara berkala	Reviu IKU dilakukan setiap tahun	Tahun 2024	Bulan Januari 2024	Kepala Dinas	Sudah selesai
3.	Evaluasi yang dilakukan per tri wulan agar dilengkapi notulen rapat memuat hasil :	-	-	-	-	-
	a. Hasil analisa dan simpulan keberhasilan serta ketidakberhasilan pencapaian target	Sudah dilakukan pencatatan dalam rapat pengendalian evaluasi program/kegiatan	Bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan Bulan Desember	Akhir Maret, akhir Juni, akhir September dan Desember	Kepala Dinas	Sudah Selesai

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi / Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Progres Penyelesaian
	dari setiap program/kegiatan dalam rencana aksi	dan sub kegiatan setiap tri wulan		2024		
	b. Hasil analisa dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakan rencana aksi	Perlu percepatan pelaksanaan Sub Kegiatan pada hamper semua sub kegiatan	Percepatan penyediaan dokumen pengadaan dan calon penerima bantuan/hibah	Bulan Mei dan Juni	PPTK dan Pejabat Pembuat Komitmen	Sudah Selesai
	c. Hasil analisa dan simpulan tentang ukuran keberhasilan capaian kinerja program/kegiatan yang memadai di dalam rencana aksi	Upaya pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Setiap bulan	April s/d Desember	PPKom dan PPTK	Sudah Selesai

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7 : Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran indicator kinerja layanan penunjang perangkat daerah yang tepenuhi dan nilai/predikat SAKIP

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	KINERJA			KEUANGAN			BAGIAN/ BIDANG
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai / Predikat SAKIP	68	65,2	95	-	-	-	Sekretariat
		Presentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	97	99,97	103	-	-	-	Sekretariat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6.809.009.783	6.694.620.915	98,32	
	a. Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Sekretariat
	i.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	44 orang bulan	44 orang bulan	100%	6.221.036.000	6.137.463.395	98,66	Sekretariat
	i.Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan tunjangan adminstrasi keuangan	13 orang bulan	13 orang bulan	100%	68.736.000	68.736.000	100	
	1.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								Sekretariat
	1.2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Disipli Pegawai	Jumlah mesin kehadiran				5.000.000	5.000.000	100	Sekretariat
	1.3 Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah								Sekretariat
	1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponeninstalasi listrik / penerangan	3 jenis	3 jenis	100%	5.002.100	4.025.450	80,48	Sekretariat
	1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	60 jenis	60 jenis	100%	40.009.350	34.923.010	87,29	
	1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	5 jenis	100%	11.140.220	10.243.280	87,29	Sekretariat
	1.3.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat kooedinasi dan konsultasi	12 op	12 op	100%	87.676.200	85.316.354	97,31	Sekretariat
	1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinath								

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	KINERJA			KEUANGAN			BAGIAN/ BIDANG
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	Daerah								
	1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah kursi	30 unit	30 unit	100%	12.843.900	12.840.000	99,97	
	1.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung gedung kantor	13 unit	13 unit	100%	115.820.170	113.160.000	97,70	
	1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Sekretariat
	1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan prangko	2 jenis	2 jenis	100%	968.533	798.500	82,44	
	1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya air dan Listrik	Cakupan waktu Pembayaran listrik, telpon, air, internet	12 bulan	12 bulan	100%	94.327.310	84.373.356	89,45	
	1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	1.6.1 Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak dan pemeliharaan kendaraan jabatan	1 unit kendaraan roda 4 dan 29 kendaraan roda 2	1 unit kendaraan roda 4 dan 29 kendaraan roda 2	100%	10.000.000	6.507.400	65,07	
	1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pajak dan pemeliharaan kendaraan oprasional	5 unit kendaraan 4 dan 12 unit kendaraan roda 2	5 unit kendaraan 4 dan 12 unit kendaraan roda 2	100%	120.000.000	114.825.170	95,69	
	1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC, lap top, printer yang dipelihara	3 jenis	3 jenis	100%	16.450.000	16.409.000	99,75	
					99%			98,32	

Pada Tabel 3.7, tentang hasil analisa persentase rata-rata capaian hasil sasaran kinerja dan penyerapan anggaran, terlihat bahwa persentase rata-rata capaian sasaran kinerja 99%, sedangkan capaian penyerapan anggaran pada program pendukung 98,32% sehingga pelaksanaan program pendukung termasuk kategori efisien.

D. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Dari segi input sumberdaya manusia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mewujudkan tujuan , sasaran dan indikator serta targetnya dengan cara melaksanakan tugas fungsi masing – masing yang sudah tertuang pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja dengan tetap dilakukan pengawasan dan bimbingan secara berjenjang. Dengan demikian semua ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merasa memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan OPD. Penempatan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah berdasarkan Analisa Jabatan yang telah ditentukan, sehingga tidak ada overlapping sumberdaya manusia pada suatu jabatan, sehingga dari segi sumberdaya manusia Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian termasuk pada kategori Efisien.

Sasaran 1 : Terjaganya ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi
Indikator 1 : Persentase ketersediaan sarana pendukung kemandirian Pangan

a. **Perbandingan target dengan realisasi kinerja pada tahun 2024**

Tabel 3.8 : Capaian Indikator Kinerja Presentase Ketersediaan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Presentase Ketersediaan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan	Persen(%)	33	33	100%

Realisasi kinerja dengan indikator Presentase Ketersediaan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan

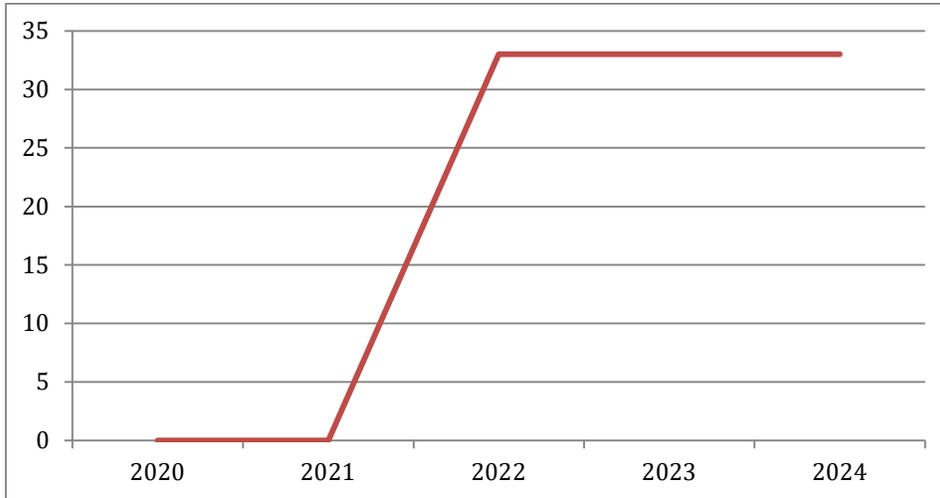
pada tahun 2024 dibandingkan target yang telah ditetapkan adalah : $(33 / 33) \times 100\% = 100\%$.

b. **Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun - tahun sebelumnya**

Tabel 3.9 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Ketersediaan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan	%	-	-	33%	33%	33%

Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya



Indikator Ketersediaan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan baru ada pada Renstra Perubahan pada tahun 2022 berdasarkan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2021. Dari tahun 2022 sampai tahun 2024 target dan realisasi ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan tetap pada angka 33%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Renstra.

Tabel 3.10 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan akhir Renstra

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024
		Target	Realisasi		
Presentase Ketersediaan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan	Persentase (%)	33%	33%	100%	33%

Capaian kinerja dengan indikator Presentase Ketersediaan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan pada tahun 2024 dibandingkan target akhir Renstra adalah :

$$(33\% / 33\%) \times 100\% = 100\%.$$

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Faktor – faktor penting yang mempengaruhi peningkatan indikator kinerja

Presentase Ketersediaan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan adalah :

1. Masalah sarana pendukung kemandirian pangan kurang mendapatkan perhatian baik dari Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat seperti bangunan lantai jemur, lumbung pangan , penggilingan padi yang disebabkan karena produksi padi Kota Tarakan kurang dari kapasitas ideal peralatan dan bangunan tersebut.
2. Tindakan nyata yang telah dilaksanakan dalam rangka penyediaan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan adalah dengan dilaksanakannya penyediaan sarana pendukung kemandirian pangan berupa peralatan dan sarana pengolahan pangan.

e. Perbaikan dan Tindak Lanjut.

Pelaksanaan pencapaian indikator Sarana Pendukung Kemandirian Pangan sudah mencapai target yang telah ditetapkan dari target di akhir Renstra, akan tetapi masih terdapat upaya – upaya yang dilakukan agar Sarana Pendukung Kemandirian Pangan meningkat jumlahnya, dengan cara sebagai berikut:

1. Dilakukan identifikasi kebutuhan infrastruktur kemandirian pangan seperti gudang penyimpan cadangan pangan di Tarakan sampai saat ini belum tersedia sehingga cadangan pangan yang ada berupa beras dititipkan di gudang Bulog Kota Tarakan. Ricemilling padi dan lantai jemur juga belum tersedia. Untuk mengusulkan anggaran penyediaan gudang cadangan pangan, ricemilling padi dan lantai jemur, diusulkan ke APBD Kota melalui Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, karena produksi padi Kota Tarakan tidak memenuhi standar kapasitas yang disediakan oleh Kementerian melalui APBN

f. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Indikator ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan ini di capai dengan dukungan dari beberapa sumber dana :

APBD Kota :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan.

1.1 Kegiatan Penyediaan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya dengan pagu 11.939.360 dan output berupa 7 jenis barang yang diserahkan kepada masyarakat. Dengan pemberian barang – barang tersebut diharapkan para penerima manfaat dapat meningkatkan produksi olahan pangan, sehingga pendapatan keluarga bertambah.



g. Analisis efisiensi penggunaan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

c. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

d. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Pada Tabel 3.11, tentang hasil analisa persentase rata-rata capaian hasil sasaran kinerja dan penyerapan anggaran, terlihat bahwa persentase rata-rata capaian sasaran kinerja 100%, sedangkan capaian penyerapan anggaran pada program pendukung 91,73% sehingga pelaksanaan program prioritas termasuk kategori efisien.

Tabel 3.11 : Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Penyediaan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan.

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		CAPAIAN	KEUANGAN		CAPAIAN
		OUTCOME / OUTPUT	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran 1 : Terjaganya ketersediaan bahan makanan penyumbang inflasi							
		Persentase ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan	33%	33%	100%			
	1.1 Program Pengelolaan sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan							
	1.1.1 Kegiatan Penyediaan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
	1.1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah barang yang diserahkan kepada masyarakat	7 jenis	7 jenis	100%	11.939.360	10.952.000	91,73
					100%			91,73%

E. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Dari segi input sumberdaya manusia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mewujudkan tujuan , sasaran dan indikator serta targetnya dengan cara melaksanakan tugas fungsi masing – masing yang sudah tertuang pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja dengan tetap dilakukan pengawasan dan bimbingan secara berjenjang. Dengan demikian semua ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merasa memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan OPD. Penempatan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah berdasarkan Analisa Jabatan yang telah ditentukan, sehingga tidak ada overlapping sumberdaya manusia pada suatu jabatan, sehingga dari segi sumberdaya manusia Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian termasuk pada kategori efisien.

Sasaran 1 : Terjaganya ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi

Indikator 2 : Persentase ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi

a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja pada tahun 2024

Tabel 3.12 : Capaian Indikator Kinerja Presentase Ketersediaan Bahan Pangan Penyumbang Inflasi

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Presentase Ketersediaan Sarana bahan pangan penyumbang inflasi	(%)	116	181,73	156%

Realisasi kinerja dengan indikator Presentase Ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi pada tahun 2024 dibandingkan target yang telah ditetapkan adalah : $(116 / 181,73) \times 100\% = 156\%$.

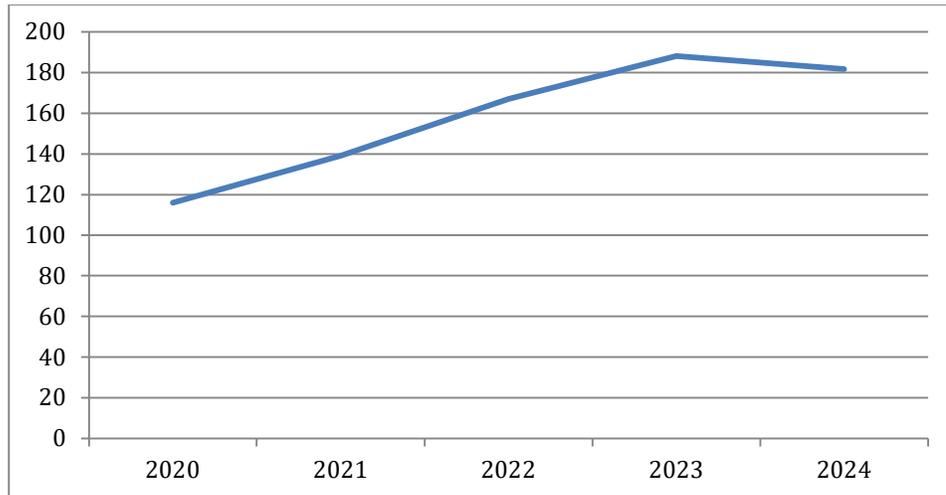
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Ketersediaan Sarana bahan pangan penyumbang inflasi	%	116	139	167	188,06	181,73

Capaian kinerja dengan indikator Presentase Ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terus mengalami peningkatan.

Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya



c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Renstra.

Tabel 3.14 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan akhir Renstra

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024
		Target	Realisasi		
Presentase Ketersediaan Sarana bahan pangan penyumbang inflasi	Persentase (%)	116	181,73	156	116

Capaian kinerja dengan indikator Presentase Ketersediaan Ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi pada tahun 2024 dibandingkan target akhir Renstra adalah : $(181,73\% / 116\%) \times 100\% = 156\%$.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Faktor – faktor penting yang mempengaruhi peningkatan indikator kinerja Presentase ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi.

Stabilisasi inflasi mendapatkan perhatian langsung dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota, dengan cara meeting zoom setiap satu minggu sekali untuk memantau dan mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk penyediaan bahan pangan penyumbang inflasi. Bahkan dari Pusat dan Provinsi sering dilaksanakan pangan murah di lokasi lokasi tertentu dengan intensitas pelaksanaan yang sering dilakukan. Tindakan nyata yang telah dilaksanakan dalam rangka penyediaan bahan pangan penyumbang inflasi. adalah dengan dilaksanakannya pangan murah di lokasi lokasi tertentu dengan intensitas pelaksanaan yang tinggi / sering dilakukan.

e. Perbaikan dan Tindak Lanjut.

Pelaksanaan pencapaian indikator Ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi sudah mencapai target yang telah ditetapkan dari target di akhir Renstra, akan tetapi masih terdapat upaya – upaya yang dilakukan agar ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi meningkat jumlahnya, dengan cara sebagai berikut:

1. Secara rutin dilaksanakan sosialisasi tentang diversifikasi pangan, agar masyarakat tidak hanya mengkonsumsi bahan pangan tertentu yang akhirnya dapat memicu tingginya bahan pangan tertentu. Dengan sosialisasi ini diharapkan

masyarakat dapat mengkonsumsi bahan pangan alternative sehingga tidak tergantung pada salah satu bahan pangan tertentu.

2. Dari segi penganggaran; dilakukan pengusulan anggaran melalui APBD Kota, APBD Provinsi, Bantuan Keuangan Provinsi, Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana CSR dan lain – lain.

f. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Indikator ketersediaan Ketersediaan bahan pangan penyumbang inflasi ini di capai dengan dukungan dari beberapa sumber dana :

APBD Kota :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan.

1.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga

1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota. Pagu sub kegiatan ini Rp. 75.364.070,- dengan uotput barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa barang – barang untuk pelaksanaan bazar. Pelaksanaan bazar atau pasar murah ini akan membantu mengurangi tingginya harga bahan pangan tertentu pada waktu – waktu tertentu, sehingga stabilitas inflasi terjaga.

1.1.2 Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan dan harga pangan pokok strategis, Pagu sub kegiatan ini Rp. 24.707.590,- dengan output jumlah barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa barang – barang

untuk pelaksanaan bazar. Pelaksanaan bazar atau pasar murah ini akan membantu mengurangi tingginya harga bahan pangan tertentu pada waktu – waktu tertentu.



g. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
2. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Pada Tabel 3.15, tentang hasil analisa persentase rata-rata capaian hasil sasaran kinerja dan penyerapan anggaran, terlihat bahwa persentase rata-rata capaian sasaran kinerja 156%, sedangkan capaian penyerapan anggaran pada program pendukung 96,89% sehingga pelaksanaan program prioritas termasuk kategori efisien.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 15 : Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran indicator kinerja ketersediaan dan kebutuhan terhadap bahan pangan penyumbang inflasi .

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		CAPAIAN	KEUANGAN		CAPAIAN
		OUTCOME / OUTPUT	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran 1 : Terjaganya ketersediaan bahan makanan penyumbang inflasi							
		Persentase ketersediaan dan kebutuhan terhadap bahan pangan penyumbang inflasi	116	181,73	156%			
	1.2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							
	1.2.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan Harga Pangan							
	1.2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	Jumlah barang bazaar yang diserahkan kepada masyarakat	5 jenis	5 jenis	100%	75.364.070	72.444.750	96,13
	1.2.1.2 Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stock , pasokan dan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah barang bazaar yang diserahkan kepada masyarakat	2 jenis	2 jenis	100%	24.707.590	24.129.000	97,66
					100%			193,79 / 2 = 96,89

h. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Dari segi input sumberdaya manusia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mewujudkan tujuan , sasaran dan indikator serta targetnya dengan cara melaksanakan tugas fungsi masing – masing yang sudah tertuang pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja dengan tetap dilakukan pengawasan dan bimbingan secara berjenjang. Dengan demikian semua ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merasa memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan OPD. Penempatan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah berdasarkan Analisa Jabatan yang telah ditentukan, sehingga tidak ada overlapping sumber daya manusia pada suatu jabatan, sehingga dari segi sumber daya manusia Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian termasuk pada kategori efisien.

Sasaran 2 : Tercapainya target pola konsumsi pangan masyarakat dan pengawasan pangan segar

Indikator 1 : Peningkatan Skor PPH (Pola Pangan Harapan)

Rumus penghitungan Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH):

<i>Skor PPH Kelompok Padi-padian + Skor PPH Umbi-umbian + Skor PPH kelompok lainnya</i>

Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disebut Skor PPH menggambarkan komposisi kelompok pangan utama yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, dengan mempertimbangkan keseimbangan yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Perhitungan Skor PPH menggunakan aplikasi/formulasi yang disiapkan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional.

a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja pada tahun 2024

Tabel 3.16 : Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Skor PPH

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Peningkatan Skor PPH	Skor PPH	81	77,7	95%

Realisasi kinerja dengan indikator Skor PPH pada tahun 2024 dibandingkan target yang telah ditetapkan adalah : $(77,7 / 81) \times 100\% = 95\%$.

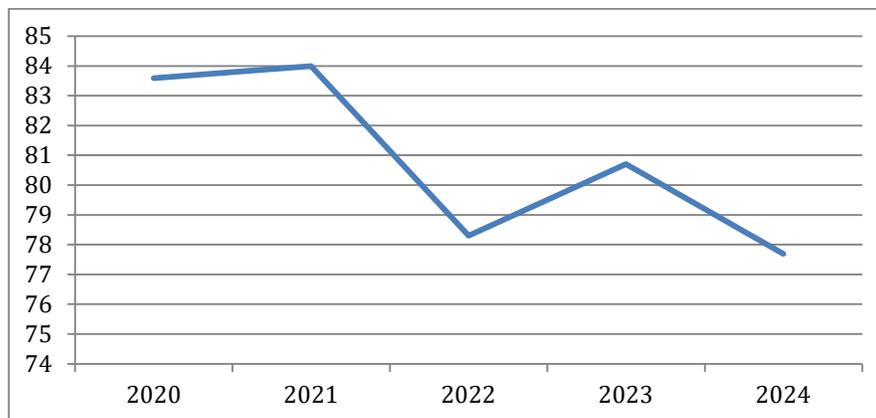
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya

Tabel 3.17 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Skor PPH	Skor PPH	83,6	84	78,3	80,7	77,7

Capaian kinerja dengan indikator Skor PPH pada tahun 2024 dibandingkan capaian kinerja pada tahun – tahun sebelumnya mengalami fluktuatif dan capaian paling rendah pada tahun 2024.

Grafik. 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya



c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Renstra.

Tabel 3.18 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan akhir Renstra

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024
		Target	Realisasi		
Peningkatan Skor PPH	Skor PPH	81	77,7	95%	86

Capaian kinerja dengan indikator Peningkatan Skor PPH pada tahun 2024

dibandingkan target akhir Renstra adalah : $(77,7/ 86) \times 100\% = 95\%$.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Penurunan Skor PPH pada tahun 2024 dibandingkan Skor PPH pada tahun 2023 disebabkan pergeseran pola konsumsi masyarakat yang menurun dan tidak memenuhi persyaratan beragam dan berimbang dan tidak lagi mempertimbangkan kandungan gizi pada makanan. Fenomena ini, terbawa dari keluarga dengan dugaan khususnya ibu yang kurang memberikan edukasi tentang gizi berimbang kepada anak-anaknya dan bahkan di rumah juga hanya disediakan makanan yang ala kadarnya ditinjau dari keragaman dan gizi. Jadi menurunnya Skor PPH ini orang yang sangat berperan adalah ibu sebagai pendidik dan orang yang harus menyiapkan makanan untuk keluarga.

e. Perbaikan dan Tindak Lanjut.

- Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai Skor PPH lebih tinggi adalah dengan cara : Sosialisasi kepada ibu-ibu agar menyiapkan makanan untuk keluarga yang bergizi dan berimbang salah satunya dengan cara pemanfaatan dan pengembangan lahan yang berada disekitar rumah untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

- Adapun langkah konkritnya dengan cara sosialisasi, bimbingan teknis, pemberian bantuan berupa saprodi. Selain itu juga diantisipasi dengan cara mendatangkan bahan pangan dari luar Tarakan. Jadi kebutuhan pangan penduduk Kota Tarakan dapat tercukupi dari segi jumlah dan keragaman serta mutunya.
- Dengan adanya sosialisasi tentang B2SA diharapkan masyarakat termotivasi untuk membudayakan diri dan masyarakat lainnya merubah pola konsumsi menjadi pangan Berimbang, Bergizi, Seimbang dan aman (B2SA).
- Selain sosialisasi tersebut, capaian Skor PPH ini dipengaruhi pula oleh pelaksanaan survey konsumsi rumah tangga. Pada saat ini konsumsi kelompok bahan pangan yang sudah mencapai skor maksimal baru pada kelompok pangan hewani, sementara yang lainnya dibawah skor maksimal. Pada bahan pangan beras, masyarakat Kota Tarakan sudah banyak yang mengurangi konsumsi beras. Sedangkan umbi-umbian hanya kalangan tertentu saja yang banyak mengkonsumsi umbi-umbian, artinya tidak semua penduduk Kota Tarakan mengkonsumsi umbi-umbian. Kacang-kacangan begitu juga, terdapat kalangan masyarakat tertentu yang takut mengkonsumsi kacang-kacangan dengan alasan kesehatan, misalnya dengan banyak mengkonsumsi kacang-kacangan akan mengakibatkan suatu penyakit tertentu. Pada sayuran dan buah, belum semua penduduk Kota Tarakan sudah bisa menerima sayuran dan buah lokal. Masih banyak penduduk yang menyukai sayuran dan buah dari luar seperti : wortel, kobis, buah pir, apel dan lain-lain.

f. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja.

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

1.1 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan dan penetapan target Konsumsi Pangan perkapita/pertahun dengan pagu anggaran 5.008.440 dan penyerapan anggaran 5.008.000, output sosialisasi pola konsumsi pangan berbasis B2SA. Dengan adanya sosialisasi tentang B2SA diharapkan masyarakat termotivasi untuk membudayakan diri dan masyarakat lainnya merubah pola konsumsi menjadi pangan Berimbang, Bergizi, Seimbang dan aman (B2SA).



1.1.2 Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, pagu Rp.117.347.190, dengan penyerapan anggaran Rp.116.140.440, out put sosialisasi pangan berbasis sumber daya lokal.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai Skor PPH lebih tinggi adalah dengan cara : Pemanfaatan dan pengembangan lahan yang berada disekitar rumah

untuk meningkatkan produksi bahan pangan lokal. Adapun langkah konkritnya dengan cara sosialisasi, bimbingan teknis, pemberian bantuan berupa saprodi.



g. Analisa efisiensi penggunaan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

2. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Pada Tabel 3.19, tentang hasil analisa persentase rata-rata capaian hasil sasaran kinerja dan penyerapan anggaran, terlihat bahwa persentase rata-rata capaian sasaran kinerja 95%, sedangkan capaian penyerapan anggaran pada program pendukung 98,99% sehingga pelaksanaan program prioritas termasuk kategori efisien.

Tabel 3.19 : Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Peningkatan Skor PPH

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		CAPAIAN	KEUANGAN		CAPAIAN
		OUTCOME / OUTPUT	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran 1 : Terjaganya ketersediaan bahan makanan penyumbang inflasi							
		Peningkatan Skor PPH	81	77,7	95%			
	2.1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							
	2.1.1. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							
	2.1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Sosialisas Pola Konsumsi Pangan berbasis B2SA				5.008.440	5.004.000	99,01
	2.1.1.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeka Ragamaan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sosialisasi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal				117.347.190	116.140.440	98,97
					95%			197,98 / 2 = 98,99

i. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Dari segi input sumberdaya manusia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mewujudkan tujuan , sasaran dan indikator serta targetnya dengan cara melaksanakan tugas fungsi masing – masing yang sudah tertuang pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja dengan tetap dilakukan pengawasan dan bimbingan secara berjenjang. Dengan demikian semua ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merasa memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan OPD. Penempatan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah berdasarkan Analisa Jabatan yang telah ditentukan, sehingga tidak ada overlapping sumber daya manusia pada suatu jabatan, sehingga dari segi sumber daya manusia Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian termasuk pada kategori Efisien.

Sasaran 2 : Tercapainya target pola konsumsi pangan masyarakat dan pengawasan pangan segar

Indikator 2 : Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan

a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja pada tahun 2024

Tabel 3.20 : Capaian Penanganan daerah rawan pangan Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	95	96	101

Realisasi kinerja dengan indikator Penanganan daerah rawan pangan pada tahun 2024 dibandingkan target yang telah ditetapkan adalah : $(95 / 96) \times 100\% = 101\%$.

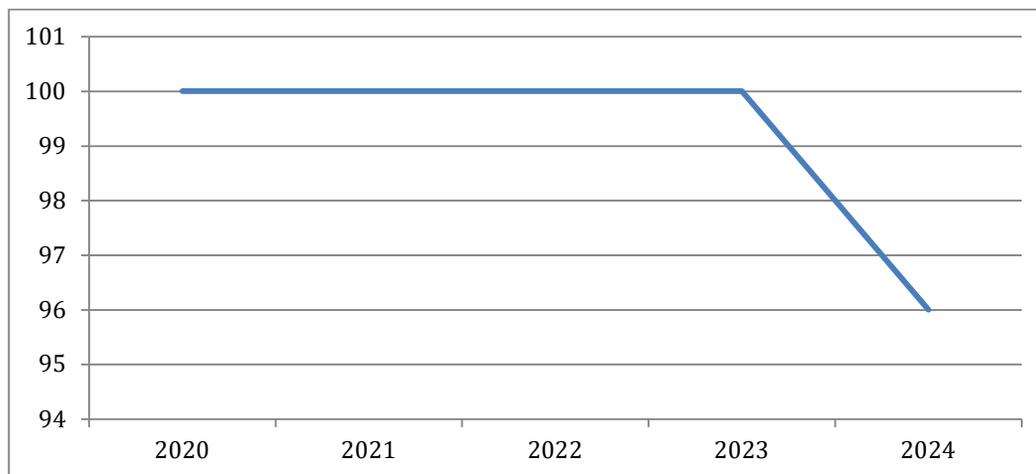
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya

Tabel 3.21 : Perbandingan Capaian Kinerja Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan tahun – tahun sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	100	100	100	100	96

Capaian indikator kinerja tahun 2020 sampai tahun 2023 tetap pada angka 100%, sedangkan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 96%, hal ini terjadi karena meningkatnya kejadian bencana alam seperti longsor dan kebakaran, sementara itu jumlah bantuan tidak mengalami peningkatan sehingga hanya mencapai angka 96%.

Grafik 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan tahun – tahun sebelumnya



c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Renstra.

Tabel 3.22 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan akhir Renstra

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024
		Target	Realisasi		
Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	95	96	101%	96

Capaian kinerja dengan indikator Penanganan daerah rawan pangan tahun 2024 dibandingkan target akhir Renstra adalah : $(96/ 96) \times 100\% = 100\%$

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Secara umum sebetulnya Kota Tarakan tidak ditemukan adanya daerah rawan pangan apabila dalam kondisi normal. Ditemukannya daerah rawan pangan apabila terjadi suatu bencana, baik itu bencana akibat terjadi kebakaran, akibat bencana banjir atau bencana lainnya. Apabila terjadi suatu bencana di suatu lokasi, maka Dinas Ketahanan Pangan ikut berperan dengan cara memberikan bantuan berupa beras dan bahan pangan lainnya. Pada tahun 2024 penanganan daerah rawan pangan menargetkan 95 % dan terealisasi 96% sehingga capaian untuk indikator kinerja ini 101% penanganan daerah rawan pangan di Tarakan.

e. Perbaikan dan Tindak Lanjut.

Secara garis besar, pelaksanaan pencapaian indikator penanganan daerah rawan pangan sudah melebihi dari target yang sudah ditetapkan dan sudah mencapai target akhir Renstra, akan tetapi masih terdapat upaya – upaya yang dilakukan guna peningkatan penanganan daerah rawan pangan Kota Tarakan, dengan cara sebagai berikut:

1. Secara berkala terus mengidentifikasi daerah rawan pangan atau potensi daerah rawan pangan.

2. Dari segi penganggaran; dilakukan pengusulan anggaran melalui APBD Kota, APBD Provinsi, Dana Dekonsentrasi dan lain – lain.

f. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja.

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan

1.1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan , Pemutakhiran, dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, dengan pagu 19.929.750 dan out put dokumen SFVA. Dengan adanya dokumen SFVA ini diharapkan tersedia data – data serta rekomendasi dalam penanganan kerentanan pangan, sehingga hal ini akan sangat membantu dalam pengambilan kebijakan atau penentuan target sasaran dan menentukan langkah mitigasi serta cara menangani daerah rentan pangan di Tarakan.



2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

2.1 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten /Kota

2.1. 1 Sub Kegiatan Pelaksanaan, Pengadaan dan Penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daera/kota,dengan pagu 20.585.920 out put beras cadangan pangan daerah. Dengan tersedianya cadangan pangan berupa beras ini akan sangat membantu apabila sewaktu – waktu terjadi bencana yang berpotensi berdampak pada terjadinya kerawanan pangan, akan

dengan cepat bisa disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dari bencana – bencana tersebut.



g. Analisis efisiensi penggunaan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
2. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Pada Tabel 3.23, tentang hasil analisa persentase rata-rata capaian hasil sasaran kinerja dan penyerapan anggaran, terlihat bahwa persentase rata-rata capaian sasaran kinerja 101%, sedangkan capaian penyerapan anggaran pada program pendukung 95,13% sehingga pelaksanaan program prioritas termasuk kategori efisien.

Tabel 3.23 : Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		CAPAIAN	KEUANGAN		CAPAIAN
		OUTCOME / OUTPUT	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran 2: Tercapainya Target Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dan Pengawasan Pangan Segar							
		Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	95	96	101%			
	2.2 Program Penanganan Kerawanan Pangan							
	2.2.1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							
	2.2.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen SFVA	1 dokumen	1 dokumen	100%	19.929.750	19.167.500	96,18
	2.3 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							
	2.3.1 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kta							
	2.3.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan, Pengadaan, dan penyaluran cadangan pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah/Kota	Beras Cadangan Pangan Daerah	1.510 kg	1.510 kg	100%	20.585.920	19.367.200	94,08
					101%			190,26 / 2 = 95,13

h. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Dari segi input sumber daya manusia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mewujudkan tujuan , sasaran dan indikator serta targetnya dengan cara melaksanakan tugas fungsi masing – masing yang sudah tertuang pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja dengan tetap dilakukan pengawasan dan bimbingan secara berjenjang. Dengan demikian semua ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merasa memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan OPD. Penempatan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah berdasarkan Analisa Jabatan yang telah ditentukan, sehingga tidak ada overlapping sumberdaya manusia pada suatu jabatan, sehingga dari segi sumber daya manusia Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian termasuk pada kategori Efisien

Sasaran 2 : Tercapainya target pola konsumsi pangan masyarakat dan pengawasan pangan segar

Indikator 3 : Persentase Keamanan Pangan yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja pada tahun 2024

Tabel 3.24 : Capaian Penanganan keamanan pangan yang dilakukan Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase keamanan pangan yang dilaksanakan	%	95	96	101

Realisasi kinerja dengan indikator penanganan keamanan pangan yang dilakukan pada tahun 2024 dibandingkan target yang telah ditetapkan adalah : $(95 / 96) \times 100\% = 101\%$.

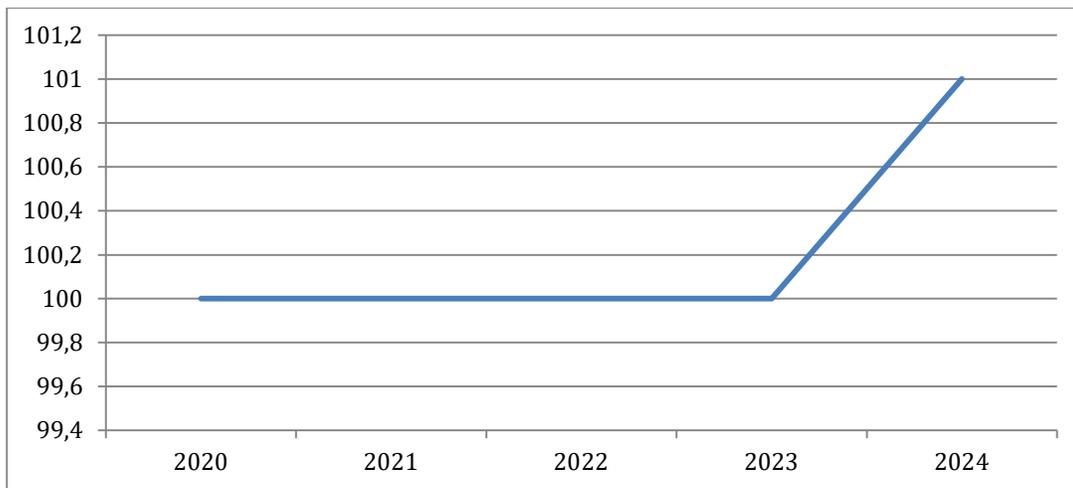
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya

Tabel 3.25 : Perbandingan Capaian Kinerja Penanganan Keamanan Pangan yang dilakukan tahun sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase keamanan pangan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	101

Capaian kinerja dengan indikator Penanganan keamanan pangan yang dilakukan pada tahun 2024 mengalami peningkatan pada tahun yang dari 2020 sampai dengan tahun 2022 tetap pada angka 100% dari target 95%.

Grafik 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Penanganan Keamanan Pangan yang dilakukan tahun sebelumnya



c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Renstra.

Tabel 3.26 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan akhir Renstra

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024
		Target	Realisasi		
Persentase keamanan pangan yang dilaksanakan	%	95	105	110	96

Capaian kinerja dengan indikator Penanganan keamanan pangan yang dilakukan tahun 2024 dibandingkan target akhir Renstra adalah : $(96/ 96) \times 100\% = 100\%$

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian dari target penanganan keamanan pangan ini adalah dengan melakukan pengujian sampel pada bahan pangan dengan intensitas tinggi dan sampel dengan sebaran lebih luas atau merata di Tarakan. Adapun uji bahan pangan yang diantaranya : uji residu pestisida pada bahan pangan, uji aflatoxin dan sebagainya.

e. Perbaikan dan Tindak Lanjut.

Untuk meningkatkan keamanan pangan di Kota Tarakan seyogyanya dilakukan dengan memperbanyak uji pada bahan pangan. Kalau pada tahun 2024 hanya dilakukan residu pestisida, pada waktu yang akan datang bisa ditambah dengan uji – uji lainnya. Selain dengan melakukan uji pada bahan pangan, juga dilaksanakan sosialisasi kepada para petani, pedagang serta masyarakat umum tentang bahaya cemaran- cemaran atau residu yang terkandung pada bahan pangan.

f. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja.

1. Program Pengawasan Keamanan Pangan

1.1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah kabupaten/kota

1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, dengan pagu 27.448.350 dan output uji residu pestisida. Dengan dilaksanakannya uji Residu pada bahan pangan ini akan diketahui seberapa kandungan pestisida yang pada bahan pangan yang diuji, sehingga bisa

diambil langkah –langkah tertentu untuk pengambilan keputusan atau kebijakan dengan dasar uji tersebut.



1.1.2 Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan segar asal tumbuhan, dengan pagu 24.955.880, dengan output koordinasi mutu dan keamanan pangan asal tumbuhan. Dengan dilaksanakannya koordinasi tentang keamanan pangan, akan mempermudah menjaga keamanan pangan di Tarakan, karena dapat dikoordinasikan dari hulu sampai hilir, mulai dari benih atau bibit tanaman, budidaya tanaman , pasca panen serta pengolahan bahan pangan akan lebih aman.



g. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

2. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Pada Tabel 3.27, tentang hasil analisa persentase rata-rata capaian hasil sasaran kinerja dan penyerapan anggaran, terlihat bahwa persentase rata-rata capaian sasaran kinerja 110%, sedangkan capaian penyerapan anggaran pada program pendukung 96,27% sehingga pelaksanaan program prioritas termasuk kategori efisien.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.27 sebagai berikut:

Tabel 27 : Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran indikator kinerja **Persentase Keamanan Pangan yang dilaksanakan**

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		CAPAIAN	KEUANGAN		CAPAIAN
		OUTCOME / OUTPUT	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran 2: Tercapainya Target Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dan Pengawasan Pangan Segar							
		Persentase Keamanan Pangan yang dilaksanakan	95	105	110%			
	2.3 Program Pengawasan Keamanan Pangan							
	2.3.1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan segar daerah Kasbupaten/Kota							
	2.3.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan segar asal tumbuhan	Uji Residu Pestisida pada sayuran	1 jenis	1 jenis	100%	27.448.350	26.143.000	95,24
	2.3.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Koordinasi mutu dan keamanan pangan asal tumbuhan	2 kali	2 kali	100%	24.955.880	24.281.800	97,30
					110%			192,54 / 2 = 96,27

h. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Dari segi input sumber daya manusia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mewujudkan tujuan, sasaran dan indikator serta targetnya dengan cara melaksanakan tugas fungsi masing – masing yang sudah tertuang pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja dengan tetap dilakukan pengawasan dan bimbingan secara berjenjang. Dengan demikian semua ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merasa memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan OPD. Penempatan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah berdasarkan Analisa Jabatan yang telah ditentukan, sehingga tidak ada overlapping sumber daya manusia pada suatu jabatan, sehingga dari segi sumberdaya manusia Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian termasuk pada kategori efisien.

Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Pertanian

Indikator 1 : Jumlah Produksi Pertanian (ton)

Indikator 2 : Produktifitas padi

Rumus Produksi Padi:

$$\text{Jumlah Produksi Padi} = \text{produksi dalam kurun waktu 1 tahun}$$

Rumus Produktifitas Padi:

$$\text{Jumlah Produksi Padi} / \text{Hektar (ton/Ha)}$$

Rumus Produksi Palawija:

$$\text{Jumlah Produksi Palawija} = \text{produksi ubi kayu} + \text{produksi ubi jalar dalam kurun waktu 1 tahun}$$

Rumus produksi sayuran:

Jumlah Produksi Sayuran = produksi bawang daun + produksi sawi + produksi kacang panjang + produksi lombok besar + produksi lombok kecil + produksi tomat + produksi terong + produksi buncis + produksi ketimun, + produksi pare + produksi gambas + produksi kangkung + produksi bayam + produksi labu + produksi jagung muda + produksi nangka muda dalam kurun waktu 1 tahun

Rumus produksi buah:

Jumlah produksi buah = salak + papaya + pisang + jeruk + durian + mangga + nangka + rambutan + jambu air + jambu biji +nanas + sukun, sirsak + semangka + petai + terap dalam kurun waktu 1 tahun

Rumus produksi biofarmaka :

Jumlah produksi buah = produksi jahe + produksi laos + produksi kunyit, + produksi temu lawak + produksi temu ireng + produksi temu kunci, + produksi kencur + produksi lempuyang + produksi serai dalam kurun waktu 1 tahun

a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja pada tahun 2024

Tabel 3.28 : Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian (2024)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Produksi pertanian	Ton	77.645,6	89.582,7	115%
Produktifitas padi	Ton/Ha	4,1	4,23	103%

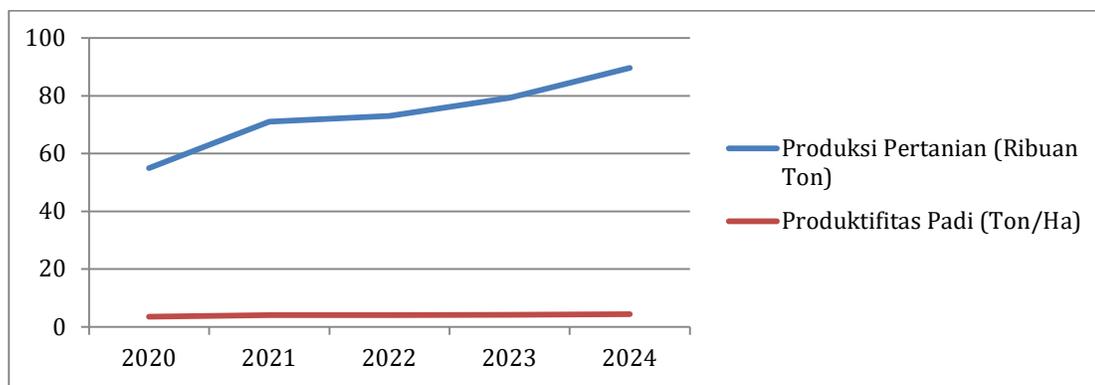
Realisasi kinerja dengan indikator Produksi Pertanian pada tahun 2024 dibandingkan target yang telah ditetapkan adalah : $(89.582,7 \text{ ton} / 77.645,6 \text{ ton}) \times 100\% = 115\%$. Sedangkan produktifitas padi tahun 2024 dibandingkan target yang telah ditetapkan adalah $(4,23 / 4,1) \times 100\% = 103\%$.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya.

Tabel 3.29 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produksi pertanian	ton	55.000	71.071	73.042	79.281	89.587,8
Produktifitas padi (ton / Ha)	ton/ha	3,6	4,1	4,1	4,2	4,38

Grafik 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya



Capaian kinerja dengan indikator Produksi Pertanian dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terus – menerus mengalami peningkatan secara signifikan. Begitu juga produktifitas padi mengalami peningkatan juga dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Peningkatan produksi pertanian ini disebabkan oleh banyak faktor yang saling mendukung, terutama produksi buah dan produksi biofarmaka. Peningkatan produksi buah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : tidak terjadi perubahan cuaca yang extreme. Selain masalah iklim, juga kesadaran masyarakat untuk menanam buah sudah mulai meningkat. Wisata petik buah juga sudah mulai bermunculan di Tarakan. Peningkatan produksi biofarmaka ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya : budidaya biofarmaka mulai dilakukan dengan

intensifikasi, permintaan pasar terhadap biofarmaka sangat tinggi, sehingga masyarakat sangat termotivasi untuk menanam biofarmaka.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Renstra.

Tabel 3.30 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan akhir Renstra

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024
		Target	Realisasi		
Produksi pertanian	Ton	77.645,6	89.582,7	115%	77.645,6
Produktifitas padi	Ton / Ha	4,1	4,38	106%	4,1

Capaian kinerja dengan indikator Produksi Pertanian pada tahun 2024 dibandingkan target akhir Renstra adalah : $(89.587,8 / 77.645,6) \times 100\% = 115\%$. Sedangkan produktifitas padi tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra adalah : $(4,38 / 4,1) \times 100\% = 106\%$. Artinya baik produksi pertanian dan produktifitas padi pada tahun 2024 telah mencapai target akhir bahkan melebihi target akhir Renstra.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Faktor – faktor penting yang mempengaruhi peningkatan/penurunan indikator kinerja peningkatan produksi pertanian :

- Peningkatan produktifitas padi ini salah satunya dipengaruhi dengan penggunaan benih unggul, pemupukan yang cukup serta pengairan yang cukup. Di Tarakan benih yang ditanam adalah Inpari dan Sentana. Selain itu juga tercukupinya air., dengan adanya bantuan irigasi perpompaan sangat membantu dalam pengairan tanaman padi.
- Komoditas sayuran yang ada di Tarakan adalah : sayuran bawang daun, sawi, kacang panjang, lombok besar, lombok kecil, tomat, terong, buncis, ketimun, pare, gambas, kangkung, bayam, labu, jagung muda dan angka muda.

Penggunaan benih sayuran di Tarakan pada umumnya sudah menggunakan benih sayuran yang berlabel atau bersertifikat. Selain diberikan bantuan benih sayuran juga pupuk, sehingga hal ini mendorong peningkatan produksi sayuran di Kota Tarakan.

- Peningkatan produksi buah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : tidak terjadi perubahan cuaca yang extreme. Selain masalah iklim, juga kesadaran masyarakat untuk menanam buah sudah mulai meningkat. Wisata petik buah juga sudah mulai bermunculan di Tarakan.

- Peningkatan produksi biofarmaka ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya : budidaya biofarmaka mulai dilakukan dengan intensifikasi, permintaan pasar terhadap biofarmaka sangat tinggi, sehingga masyarakat sangat termotivasi untuk menanam biofarmaka.

e. Perbaikan dan Tindak Lanjut.

Pelaksanaan pencapaian indikator peningkatan produksi pertanian sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan melebihi dari target, akan tetapi masih terdapat upaya – upaya yang dilakukan guna pengembangan pembangunan pertanian Kota Tarakan, dengan cara sebagai berikut:

- Penggunaan benih sangat berpengaruh kepada produktifitas padi. Di Tarakan benih yang ditanam adalah Inpari dan Sentana.

- Dengan diberikannya hibah bantuan irigasi perpompaan dan sarana produksi pertanian serta prasarana pendukung pertanian, akan mendorong peningkatan produksi pertanian di Kota Tarakan.

- Selain pemberian bantuan, secara terus menerus dilakukan penyuluhan, pembinaan, pemantauan hama penyakit , penggunaan bibit unggul, pengolahan

lahan yang benar, peningkatan sarana dan prasarana pengairan serta penjaminan ketersediaan pupuk.

- Saran kepada Pemerintah Kota Tarakan dalam rangka peningkatan produksi padi adalah dengan cara Penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Rencana Tata Ruang dengan tujuan pencegahan alih fungsi lahan, sehingga tidak terjadi lagi pengurangan luas lahan tanaman padi. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan pupuk adalah dengan cara menyusun Rencana Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara tepat sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah ditentukan.

- Upaya untuk meningkatkan produksi palawija dengan cara melaksanakan intensifikasi pertanian, dengan didukung kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian seperti bibit unggul, pupuk dan peralatan pertanian.

- Untuk meningkatkan produksi buah di Kota Tarakan, dilakukan dengan cara penyerahan benih dan bibit buah serta dilakukan penyuluhan yang terus menerus oleh para Penyuluh Pertanian Lapangan.

- Disarankan kepada Kementerian Pertanian Dirjend. Prasarana dan Sarana agar dapat menjamin ketersediaan bibit/benih serta pupuk baik dalam jumlah maupun kualitas. Selain ketersediaan bibit/benih dan pupuk juga disarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Tarakan agar dibangun agrowisata buah, selain untuk kebutuhan konsumsi juga edukasi serta wisata.

- Upaya yang dilakukan guna peningkatan produksi biofarmaka adalah dengan memberikan saprodi serta penyuluhan yang terus menerus dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. Selain hal tersebut juga diharapkan usaha yang menggunakan bahan baku biofarmaka lebih ditingkatkan, sehingga hal ini akan memotivasi petani biofarmaka lebih semangat dalam meningkatkan produksinya.

- Disarankan kepada Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Tanaman Obat agar dapat menjamin ketersediaan bibit/benih baik dalam jumlah maupun kualitas.

f. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Indikator Produksi Hasil Pertanian dicapai dengan melaksanakan beberapa program dari beberapa sumber dana;

1. APBD Kota :

1.1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1.1.1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

1.1.1.1 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung

Pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi, pagu sub kegiatan

: Rp. 3.738.315.300,- dengan output bibit rambutan binjai dan pupuk, hibah benih

kangkung, benih cabe rawit, benih sawi sendok, benih tomat, benih jagung manis,

terong ungu, bibit jambu Kristal, pembangunan green house di Juata Laut , Juata

Permai dan Sebengkok, pestisida, pupuk, insektisida, perangkat alat buah, mulsa,

bibit durian, bibit lengkung, bibit rambutan, sarana hidroponik kepada kelompok tani.

Dengan adanya bantuan ini diharapkan akan mengurangi biaya produksi baik itu

berupa bibit, benih, pupuk, pestisida dan peralatan pertanian lainnya sehingga hasil

panen akan meningkat.



1.1.1.2 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Rp. 279.995.500, dengan output : 8 unit cultivator, 18 unit hand sprayer, keranjang panen dan 24 unit gerobak ban 1. Penerima hibah atas barang barang tersebut tersebar di semua kecamatan. Dengan adanya bantuan ini diharapkan akan mengurangi biaya produksi berupa peralatan pertanian, juga akan mempercepat waktu pengerjaan budidaya dan panen sehingga hasil panen akan meningkat.

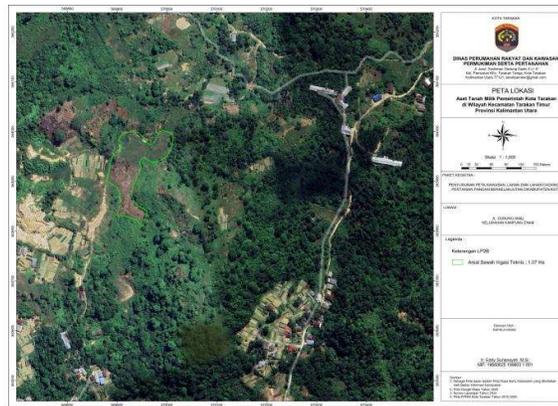


1.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1.2.1 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

1.2.1.1 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pagu sub kegiatan 28.264.060,- ,

dengan output peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dengan adanya peta LP2B ini dapat memberikan jaminan dalam berusaha di kawasan tersebut tanpa ditakuti kalau suatu saat kawasan tersebut akan dialihfungsikan. Dengan adanya peta LP2B ini dapat memberikan jaminan dalam berusaha di kawasan tersebut tanpa ditakuti kalau suatu saat kawasan tersebut akan dialihfungsikan.



2. Bantuan dari Provinsi dan Kementerian (Tugas Pembantuan)

NO	JENIS BANTUAN HIBAH	PENERIMA HIBAH	VOLUME	SATUAN	SUMBER DANA
1	MESIN POMPA AIR	1 KELOMPOK TANI BAROKAH	1	UNIT	APBN
		2 KELOMPOK TANI BINA USAHA SEJAHTERA	1	UNIT	APBN
		3 KELOMPOK TANI BINA WARGA	2	UNIT	APBN
		4 KELOMPOK TANI CAHAYA MAJU	2	UNIT	APBN
		5 KELOMPOK TANI EMBUNG BENGAWAN	1	UNIT	APBN
		6 KELOMPOK TANI HARAPAN MAJU	1	UNIT	APBN
		7 KELOMPOK TANI HARAPAN NUSANTARA	1	UNIT	APBN
		8 KELOMPOK TANI HARAPAN SEJAHTERA	1	UNIT	APBN
		9 KELOMPOK TANI JIWA BARU	1	UNIT	APBN
		10 KELOMPOK TANI NUSANTARA SUBUR I	1	UNIT	APBN
		11 KELOMPOK TANI NUSANTARA	1	UNIT	APBN
		12 KELOMPOK TANI PASUNDAN	1	UNIT	APBN
		13 KELOMPOK TANI PERJUANGAN SEHATI	1	UNIT	APBN
		14 KELOMPOK TANI ROJO ROYO	1	UNIT	APBN
		15 KELOMPOK TANI SABINDO	1	UNIT	APBN
		16 KELOMPOK TANI TUNAS MEKAR	1	UNIT	APBN
		17 KELOMPOK TANI USAHA BANGKIT	1	UNIT	APBN

NO	JENIS BANTUAN HIBAH	PENERIMA HIBAH	VOLUME	SATUAN	SUMBER DANA
		18 KELOMPOK TANI MAPAN SEJAHTERA	1	UNIT	APBN
		19 KELOMPOK TANI SERUMPUN I	1	UNIT	APBN
		20 KELOMPOK TANI TUO MARANNU	1	UNIT	APBN
		21 KELOMPOK TANI MEKAR JAYA	1	UNIT	APBN
		22 KELOMPOK TANI MANDIRI	1	UNIT	APBN
		23 KELOMPOK TANI SINAR HARAPAN 1&2	1	UNIT	APBN
2	HANDSPRAYER ELEKTRIK	1 KELOMPOK TANI CAHAYA MAJU	3	UNIT	APBN
		2 KELOMPOK TANI BINALATUNG MANDIRI	2	UNIT	APBN
		3 KELOMPOK TANI BAROKAH	3	UNIT	APBN
		4 KELOMPOK TANI EMBUNG BENGAWAN	4	UNIT	APBN
		5 KELOMPOK TANI TUNAS MEKAR	3	UNIT	APBN
3	BENIH PADI BIOSALIN	1 KELOMPOK TANI MAPAN SEJAHTERA	20	KG	APBD I
4	PESTISIDA	1 KELOMPOK TANI MEKAR RAYA KARUNGAN	5	BOTOL	APBD I
			12	BUNGKUS	APBD I
			5	BUNGKUS	APBD I
5	BENIH PADI LABEL UNGU	1. KELOMPOK TANI MAPAN SEJAHTERA	187.5	Kg	APBD I
		2. KELOMPOK TANI MANDIRI	187.5	Kg	APBD I
		3. KELOMPOK TANI SERUMPUN I	187.5	Kg	APBD I
		4. KELOMPOK TANI TUO MARENNU	187.5	Kg	APBD I
6	PESTISIDA	1. KELOMPOK TANI MAPAN SEJAHTERA	15	BOTOL	APBD I
		2. KELOMPOK TANI MANDIRI	15	BOTOL	APBD I
		3. KELOMPOK TANI SERUMPUN I	15	BOTOL	APBD I
		4. KELOMPOK TANI TUO MARENNU	15	BOTOL	APBD I
7	BENIH CABAI	1. KELOMPOK TANI PERJUANGAN SEHATI	10	BUNGKUS	APBD I
		2. KELOMPOK TANI SIPORANNU	10	BUNGKUS	APBD I
		3. KELOMPOK TANI SIKAMALI	10	BUNGKUS	ABBD I
		4. KELOMPOK TANI SEPAKAT	5	BUNGKUS	APBD I
8	MULSA	1. KELOMPOK TANI PERJUANGAN SEHATI	4	ROLL	APBD I
		2. KELOMPOK TANI SIPORANNU	4	ROLL	APBD I
		3. KELOMPOK TANI SIKAMALI	4	ROLL	ABBD I
		4. KELOMPOK TANI SEPAKAT	2	ROLL	APBD I
9	PUPUK SP26 DAN NPK	1. KELOMPOK TANI PERJUANGAN SEHATI	6	ZAK	APBD I
		2. KELOMPOK TANI SIPORANNU	6	ZAK	APBD I

NO	JENIS BANTUAN HIBAH	PENERIMA HIBAH	VOLUME	SATUAN	SUMBER DANA
		3. KELOMPOK TANI SIKAMALI	6	ZAK	ABBD I
		4. KELOMPOK TANI SEPAKAT	3	ZAK	APBD I
10	BENIH SEMANGKA	1. KELOMPOK TANI JIWA BARU	10	BUNGKUS	APBD I
		2. KELOMPOK TANI LOMBOK SUKAMAJU	10	BUNGKUS	APBD I
		3. KELOMPOK TANI BAREAN TANI	10	BUNGKUS	ABBD I
		4. KELOMPOK TANI SHAROAN	10	BUNGKUS	APBD I
11	MULSA	1. KELOMPOK TANI JIWA BARU	4	ROLL	APBD I
		2. KELOMPOK TANI LOMBOK SUKAMAJU	4	ROLL	APBD I
		3. KELOMPOK TANI BAREAN TANI	4	ROLL	APBD I
		4. KELOMPOK TANI SHAROAN	4	ROLL	APBD I
12	PUPUK SP26 DAN NPK	1. KELOMPOK TANI JIWA BARU	6	ZAK	APBD I
		2. KELOMPOK TANI LOMBOK SUKAMAJU	6	ZAK	APBD I
		3. KELOMPOK TANI BAREAN TANI	6	ZAK	APBD I
		4. KELOMPOK TANI SHAROAN	6	ZAK	APBD I
13	BIBIT JERUK	1. KELOMPOK TANI NUSANTARA SUBUR 1	3,250	BATANG	APBD I
		2. KELOMPOK TANI HARAPAN MAJU	1,750	BATANG	APBD I
		3. KELOMPOK TANI CAHAYA MAJU	500	BATANG	APBD I
14	PUPUK CAIR	1. KELOMPOK TANI NUSANTARA SUBUR 1	10	BOTOL	APBD I
		2. KELOMPOK TANI HARAPAN MAJU	6	BOTOL	APBD I
		3. KELOMPOK TANI CAHAYA MAJU	2	BOTOL	APBD I
15	BIBIT ALPUKAT	1. KELOMPOK TANI NUSANTARA SUBUR 1	510	BATANG	APBD I
		2. KELOMPOK TANI HARAPAN MAJU	510	BATANG	APBD I
		3. KELOMPOK TANI FLORA FAUNA MANDIRI	200	BATANG	APBD I
		4. KELOMPOK TANI CAHAYA MAJU	150	BATANG	APBD I
16	BIBIT JAGUNG MANIS	1. KELOMPOK TANI BAROKAH	40	BUNGKUS	APBD I
		2. KELOMPOK TANI MASPUL	40	BUNGKUS	APBD I
		3. KELOMPOK TANI BINALATUNG MANDIRI	40	BUNGKUS	APBD I
		4. KELOMPOK TANI BINA WARGA	40	BUNGKUS	APBD I
		5. KELOMPOK TANI HIKMAH MANDIRI	40	BUNGKUS	APBD I
		6. KELOMPOK TANI TUNAS MEKAR	40	BUNGKUS	APBD I
		7. KELOMPOK TANI NUSANTARA	40	BUNGKUS	APBD I
		8. KELOMPOK TANI SIDOSEMI	40	BUNGKUS	APBD I
		9. KELOMPOK TANI SEJATI	40	BUNGKUS	APBD I
		10. KELOMPOK TANI SHAROAN	40	BUNGKUS	APBD I

NO	JENIS BANTUAN HIBAH	PENERIMA HIBAH	VOLUME	SATUAN	SUMBER DANA
		11. KELOMPOK TANI CAHAYA BARU	40	BUNGKUS	APBD I
		12. KELOMPOK TANI DALLEK	20	BUNGKUS	APBD I
		13. KELOMPOK TANI CAHAYA MAJU	40	BUNGKUS	APBD I
		14. KELOMPOK TANI SIKAMALI	20	BUNGKUS	APBD I
		15. KELOMPOK TANI KARYA HARAPAN	40	BUNGKUS	APBD I
		16. KELOMPOK TANI FAJAR	20	BUNGKUS	APBD I
		17. KELOMPOK TANI LANDO RUNDUN	20	BUNGKUS	APBD I
17	BIBIT JAGUNG PIPIL	1. KELOMPOK TANI SABINDO	150	BUNGKUS	APBD I
18	RUMAH BANGSAL, ALAT PENGOLAHAN, ALAT PASCA PANEN, ALAT PEMASARAN	1. KWT HIKMAH MANDIRI	1	PAKET	APBD I



g. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
2. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Pada Tabel 3.31, tentang hasil analisa persentase rata-rata capaian hasil sasaran kinerja dan penyerapan anggaran, terlihat bahwa persentase rata-rata capaian sasaran kinerja 109%, sedangkan capaian penyerapan anggaran pada program pendukung 98,66% sehingga pelaksanaan program prioritas termasuk kategori efisien.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.31 sebagai berikut:

Tabel 3.31 : Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran indikator kinerja Produksi pertanian (ton) dan Produktifitas padi (ton / Ha)

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		CAPAIAN	KEUANGAN		CAPAIAN
		OUTCOME / OUTPUT	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran 3 : Meningkatnya produksi pertanian							
		Produksi pertanian (ton)	77.645,6	89.582,7	115%			
		Produktifitas Pertanian	4,1	4,23	103%			
	3.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian							
	3.1.1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							
	3.1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah sarana prasarana pertanian yang dihibahkan	4 jenis	4 jenis	100%	3.738.315.300	3.685.439.357	98,59
	3.1.1.2 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana prasarana pertanian yang dihibahkan	3 jenis	3 jenis	100%	279.995.500	277.140.000	98,98
	3.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian							
	3.2.1 Kegiatan Prasarana Pertanian							
	3.2.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Peta LPPB	1 peta	1 peta	100%	28.264.060	27.813.762	98,41
					218 / 2 = 109%			295,98 / 3 = 98,66

h. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Dari segi input sumber daya manusia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mewujudkan tujuan , sasaran dan indikator serta targetnya dengan cara melaksanakan tugas fungsi masing – masing yang sudah tertuang pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja dengan tetap dilakukan pengawasan dan bimbingan secara berjenjang. Dengan demikian semua ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merasa memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan OPD. Penempatan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah berdasarkan Analisa Jabatan yang telah ditentukan, sehingga tidak ada overlapping sumber daya manusia pada suatu jabatan, sehingga dari segi sumber daya manusia Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian termasuk pada kategori Efisien

Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan

Indikator 1 : Jumlah produksi daging

Indikator 2 : Jumlah produksi telur

Rumus Produksi daging :

Produksi daging = (produksi daging sapi + produksi daging kambing + produksi daging babi + produksi daging ayam buras + produksi daging ayam potong + produksi daging ayam petelur + produksi itik + produksi daging merpati + produksi daging kelinci) dalam 1 tahun

Rumus Produksi telur :

Produksi telur = (produksi telur ayam kampung + produksi ayam petelur + produksi telur itik + produksi telur puyuh) dalam 1 tahun

Yang dimaksud produksi daging di Kota Tarakan adalah : daging sapi potong, daging kambing, daging babi, daging ayam buras, daging ayam potong, daging ayam petelur, daging itik/entok, daging merpati dan daging kelinci dalam kurun waktu tahun 2024 dalam satuan kilogram (kg).

Yang dimaksud produksi telur di Kota Tarakan adalah : telur ayam kampung + ayam petelur + telur itik + telur puyuh, dalam kurun waktu tahun 2024 dalam satuan kilogram (kg).

a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja pada tahun 2024

Tabel 3.32 : Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan (2024)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Produksi peternakan				
Daging	kg	7.893.179	7.917.817	100,2 %
Telur	kg	1.483.000	1.768.758	119,3 %
		Rata - rata		219,5 / 2 = 109,75

Realisasi kinerja dengan indikator Produksi Daging pada tahun 2024 dibandingkan target yang telah ditetapkan adalah : $(7.917.817 \text{ kg} / 7.893.179 \text{ kg}) \times 100\% = 100,2\%$.

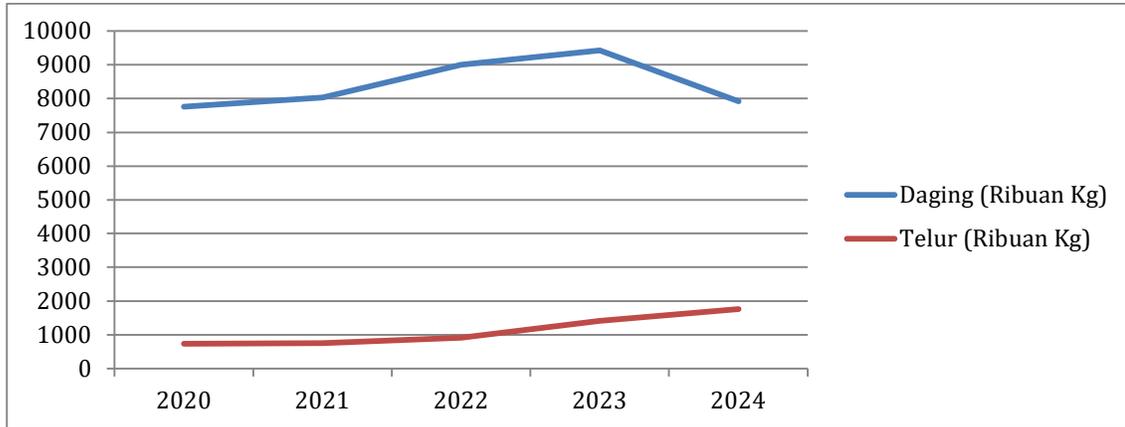
Realisasi kinerja dengan indikator Produksi Telur pada tahun 2024 dibandingkan target yang telah ditetapkan adalah : $(1.768.758 \text{ kg} / 1.483.000 \text{ kg}) \times 100\% = 119,3\%$. Jadi rata – rata capaian kinerja produksi peternakan (daging dan telur adalah = 109,75%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya

Tabel 3.33 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Peternakan						
Daging	Kg	7.753.890	8.025.310	9.002.200	9.419.885	7.917.817
Telur	Kg	741.940	753.058	912.060	1.414.486	1.768.758

Grafik 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya



Indikator produksi daging dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terus menerus mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2024 sebesar 7.917.817 kg mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 9.419.885 kg, akan tetapi masih memenuhi target tahun 2024 yang telah ditetapkan . Sedangkan produksi telur mengalami peningkatan terus dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Renstra.

Tabel 3.34 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan akhir Renstra

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024
		Target	Realisasi		
Produksi peternakan					
Daging	Kg	7.893.179	7.917.817	100,2	7.898.179
Telur	Kg	1.483.000	176.875	119,3	1.483.000

Capaian kinerja dengan indikator Produksi daging pada tahun 2024 dibandingkan target akhir Renstra adalah : $(7.898.179 \text{ kg} / 7.917.817 \text{ kg}) \times 100\% = 100\%$

Capaian kinerja dengan indikator produksi telur pada tahun 2024 dibandingkan target akhir Renstra adalah : $(176.875 \text{ kg} / 1.483.000 \text{ kg}) \times 100\% = 110\%$

Jadi capaian kinerja produksi peternakan pada tahun 2024 dibandingkan target Renstra adalah : $210\% / 2 = 105\%$

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Kenaikan produksi daging di Kota Tarakan ini didominasi dari daging ayam potong. Telur yang ada di Kota Tarakan adalah : telur ayam ras, telur ayam kampung dan telur itik. Kenaikan produksi telur ini disebabkan karena bertambahnya layer siap produksi (regenerasi) dan adanya peternak layer baru.

Faktor – faktor penting yang mempengaruhi peningkatan capaian indikator kinerja peningkatan produksi peternakan adalah :

1. Kenaikan produksi daging di Kota Tarakan ini didominasi dari daging ayam potong. Telur yang ada di Kota Tarakan adalah : telur ayam ras, telur ayam kampung dan telur itik. Kenaikan produksi telur ini disebabkan karena bertambahnya layer siap produksi (regenerasi) dan adanya peternak layer baru.
2. Pemberian bantuan berupa sarana produksi peternakan seperti: bibit sapi potong, bibit pakan, vaksinasi, Inseminasi Buatan (kawin suntik), pemeriksaan kesehatan hewan kepada peternak. Pemberian bantuan ini diawali dengan cara pengajuan proposal, selanjutnya dilakukan seleksi calon lokasi dan calon penerima bantuan, apakah calon tersebut layak atau tidak menerima bantuan atau hibah. Selanjutnya calon penerima yang sudah diverifikasi dibuatkan Surat Keputusan Walikota untuk menerima hibah;
3. Pemeriksaan kesehatan hewan, vaksinasi serta pengobatan hewan dilaksanakan secara reguler dan berdasarkan permohonan atau laporan peternak apabila diperlukan.

4. Pemberian penyuluhan dan pendampingan oleh para Petugas Penyuluh Lapangan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing PPL. Pemberian penyuluhan ini dilakukan secara rutin, akan tetapi apabila diperlukan, para peternak atau kelompok tani bisa menghubungi PPL untuk konsultasi ;

e. Perbaikan dan Tindak Lanjut.

Untuk meningkatkan produksi daging dan telur di Kota Tarakan dapat dilaksanakan langkah – langkah berikut :

- Menggunakan bibit (untuk sapi dan sejenisnya atau DOC untuk ayam, itik dan sejenisnya) yang unggul dan sehat.
- Dilakukan surveilans dengan cakupan wilayah dan sampel yang memadai untuk dilakukan pemeriksaan sampel.
- Dengan melaksanakan budidaya peternakan yang baik dan dilaksanakan pemeriksaan hewan secara rutin.
- Dilakukan pengawasan lalu lintas keluar masuk hewan dan produk hewan.
- Secara terus menerus dilakukan sosialisasi tentang budidaya dan kesehatan hewan, penyuluhan, pembinaan, pemantauan hama penyakit, serta menyediakan sarana produksi bermutu tinggi dan tersedia secara kontinyu.

f. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Indikator Produksi Hasil Peternakan dicapai dengan dukungan beberapa program dan dari beberapa sumber dana :

1. APBD Kota :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1.1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SGD) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten /Kota

1.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SGD Hewan/Tanaman pagu sub kegiatan : Rp. 25.009.020,- dengan output : 1.566 kg pakan ayam Nunukan. Tujuan pemeliharaan ayam Nunukan salah satunya adalah untuk melestarikan ayam Nunukan yang merupakan salah satu plasma nutfah Kalimantan Timur/Kalimantan Utara. Selain untuk melestarikan keberadaannya, ayam Nunukan juga berbeda dengan ayam kampung pada umumnya. Telur yang dihasilkan ayam Nunukan lebih banyak dan postur tubuhnya juga lebih besar sehingga berat badannya juga lebih banyak pada umur yang sama, dibandingkan dengan ayam kampung, sehingga juga sangat berpengaruh dalam peningkatan produksi telur dan daging. Akan tetapi untuk saat ini belum dikembangkan dengan tujuan untuk peningkatan produksi daging ayam. Jumlah ayam Nunukan yang ada di Tarakan sekitar \pm 900 ekor. Yang tersebar di masyarakat, sedangkan yang dipelihara oleh Dinas sebanyak 66 ekor.



1.2 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam daerah Kabupaten / Kota.

1.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/pakan serta benih/ bibit Hijauan Pakan Ternak dengan pagu 10.000.000, output uji sampel pakan proximat. Dengan dilaksanakannya uji ini dapat diketahui tidak ditemukan kadar zat berbahaya, sehingga aman untuk dikonsumsi ternak

1.3 Kegiatan Pengawasan Obat di tingkat Pengecer

1.3.1 Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan dengan pagu 10.000.000 output uji tapis screening pada daging. Dengan dilaksanakan uji ini dapat diketahui penyakit hewan atau produk hewan yang ada, sehingga dapat dilakukan pencegahan penyakit menular secara dini.



1.4 .Kegiatan Penyediaan Benih , Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam satu daerah Kabupaten/Kota

1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten Kota Lain dengan pagu 17.043.750, output 1.835 stek hijauan pakan ternak. Salah satu cara untuk mengurangi kekurangan pakan adalah dengan menyediakan stek hijauan pakan ternak yang disediakan untuk para peternak di Tarakan, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hijauan pakan ternak, yang hasil akhirnya produksi daging akan meningkat.



1.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah lain dengan pagu, 748.671.750, output 70 ekor DOC ayam nunukan dan obat obatan , rehab kandang ayam nunukan, DOC ayam kampung super 700 ekor, DOC ayam nunukan 100 ekor, pakan ayam, 20 ekor sapi , kambing peranakan etawa 10 ekor, 10 ekor kelinci. Dengan adanya bantuan hibah berupa sapi bibit dan ayam nunukan serta ayam kampung super ini diharapkan produksi daging di Kota Tarakan akan meningkat.



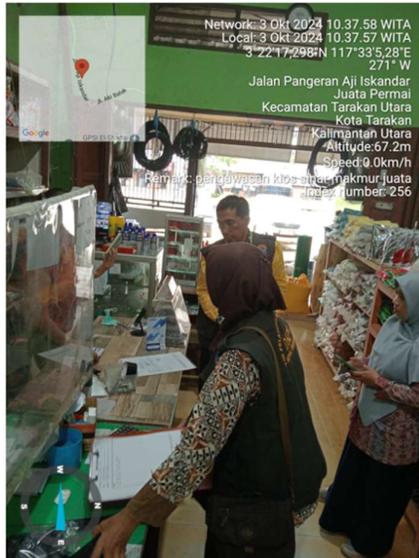
2. Program Program Perizinan Usaha Pertanian

2.1 Kegiatan Penertiban Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten /Kota

2.1.1 Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Rp.5.002.000. Dengan pelaksanaan sub kegiatan ini diharapkan teknis pelaksanaan usaha peternakan yang dilakukan di Tarakan memenuhi persyaratan teknis, sehingga pelaksanaan usaha peternakan tidak akan sesuai dengan teknis budidaya anjuran.



2.1.2 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standard dan Izin Usaha Pertanian Rp.5.042.000 Dengan pelaksanaan sub kegiatan ini diharapkan usaha peternakan yang dilakukan di Tarakan memenuhi persyaratan usaha, sehingga pelaksanaan usaha peternakan tidak akan menimbulkan masalah baru atau masalah sosial dan lingkungan.



2.2 Kegiatan Izin Usaha Pengecer (toko, retail, distributor) obat Hewan

2.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan 3.250.000, dengan output baju rompi pengawasan. Dengan pemakaian rompi seragam ini akan menimbulkan kesan kedisiplinan sehingga akan menumbuhkan efek segan kepada petugas pengawasan yang tujuannya para pelaku distributor, took, retail obat hewan akan melaksanakan usahanya sesuai dengan aturan yang ada.



h. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

2. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Pada Tabel 3.35, tentang hasil analisa persentase rata-rata capaian hasil sasaran kinerja dan penyerapan anggaran, terlihat bahwa persentase rata-rata capaian sasaran kinerja 101%, sedangkan capaian penyerapan anggaran pada program pendukung 95,13% sehingga pelaksanaan program prioritas termasuk kategori efisien.

Tabel 3.35 : Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran indikator kinerja peningkatan produksi daging dan telur

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		CAPAIAN	KEUANGAN		CAPAIAN
		OUTCOME / OUTPUT	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran 3 : Meningkatkan produksi pertanian							
		Jumlah produksi Peternakan (kg)	7.893.179	7.905.179	101%			
		Produktifitas Ayam Potong	1,83	1,83	100%			
	3.3 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian							
	4.6.1 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota							
	3.3.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG hewan/tanaman	Pakan ayam Nunukan	1.566 kg	1.566 kg	100%	25.009.020	25.009.020	100
	3.3.2 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam daerah Kabupaten/Kota							
	3.3.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan /pakan benih/bibit hijauan Pakan Ternak	Uji sampel pakan	12 sampel	12 sampel	100%	10.000.000	7.639.000	76,39
	3.3.3 Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di tingkat Pengecer							
	3.3.3.1 Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Pemeriksaan hewan qurban	1 kali	1 kali	100%	10.000.000	5.593.000	55,93
	3.3.4 Kegiatan Penyediaan Benih , Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam satu daerah Kabupaten/Kota							

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		CAPAIAN	KEUANGAN		CAPAIAN
		OUTCOME / OUTPUT	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
	3.3.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten Kota Lain	Penanaman Bibit HMT	1.835 batang	1.835 batang	100%	37.346.750	35.013.640	93,75
	3.3.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah lain	DOC ayam Nunukan, ayam kampong super dan sapi bibit potong	3 jenis	3 jenis	100%	748.671.750	747.203.839	99,8
	7. Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan surat layanan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan						
	3.4.1 Kegiatan Penertiban Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan waktu pemberian rekomendasi izin usaha						
	3.4.1.1 Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Sosialisasi persyaratan izin usaha	1 kali	1 kali	100%	5.002.000	4.750.000	94,96
	3.4.1.2 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standard an Izin Usaha Pertanian	Pengawasan penerapan standardan izin usaha pertanian	2 kali	2 kali	100%	5.042.000	4.890.000	96,99
	3.4..2 Kegiatan Izin Usaha Pengecer (took, retail, distributor) obat Hewan							
	3.4.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah rompi petugas pengawasan	13 lembar	13 lembar	100%	3.250.000	3.250.000	100

i. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Dari segi input sumber daya manusia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mewujudkan tujuan, sasaran dan indikator serta targetnya dengan cara melaksanakan tugas fungsi masing – masing yang sudah tertuang pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja dengan tetap dilakukan pengawasan dan bimbingan secara berjenjang. Dengan demikian semua ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merasa memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan OPD. Penempatan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah berdasarkan Analisa Jabatan yang telah ditentukan, sehingga tidak ada overlapping sumber daya manusia pada suatu jabatan, sehingga dari segi sumber daya manusia Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian termasuk pada kategori Efisien

Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan

Indikator 3 : Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun } t - 1}{\text{Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun } t}$$

a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja pada tahun 2024

Tabel 3.36 : Capaian Sasaran Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	9,1	10,78	118

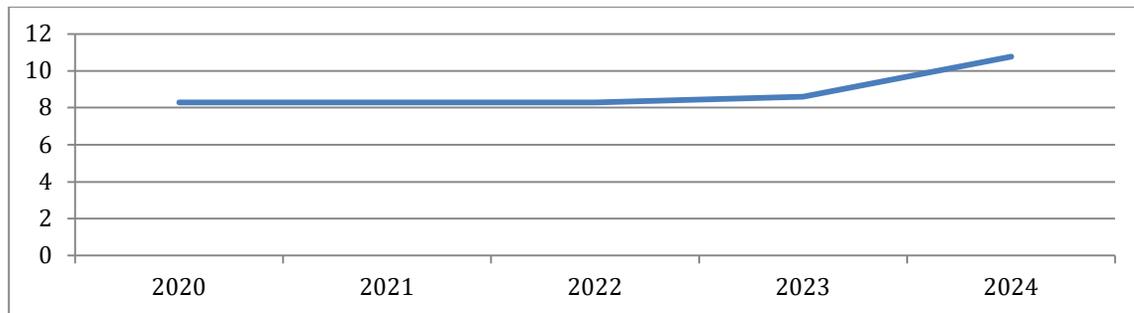
Realisasi kinerja dengan indikator Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular pada tahun 2024 dibandingkan target yang telah ditetapkan adalah :
 $(10,78\% / 9,1\%) \times 100\% = 118\%$.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya

Tabel 3.37 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	%	8,3	8,3	8,3	8,6	10,78

Grafik 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya



Indikator Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular dari tahun 2020 sampai tahun 2022 stabil pada 8,3%. Pada periode ini tidak terdapat lonjakan kasus penyakit hewan menular, sehingga treatment yang dilakukan adalah pencegahan penyakit yang sudah rutin dilaksanakan seperti surveilans, vaksinasi dan pendampingan atau penyuluhan. Tahun 2023 terjadi wabah penyakit di Indonesia yaitu penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pada tahun ini dilakukan pencegahan penyakit hewan menular secara intensif dan intensitas yang tinggi dan pemasukan hewan ke Tarakan diperketat sehingga berhasil meningkatkan penurunan kasus 10,78 5 dibandingkan tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Renstra.

Tabel 3.38 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan akhir Renstra

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi		
Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	9,1	10,78	118%	9,1

Capaian kinerja dengan indikator Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular pada tahun 2024 dibandingkan target akhir Renstra adalah :
 $(10,78\% / 9,1\%) \times 100\% = 118\%$

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Pada kondisi tidak terdapat wabah penyakit, dilakukan pencegahan penyakit menular dengan cara yang sudah rutin dilaksanakan seperti surveilans, vaksinasi dan pendampingan atau penyuluhan. Sedangkan apabila terjadi wabah penyakit di Indonesia dilakukan pencegahan penyakit hewan menular secara intensif dan intensitas yang tinggi dan pemasukan hewan ke Tarakan diperketat .

e. Faktor – faktor penting yang mempengaruhi peningkatan capaian indikator kinerja

Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular **adalah :**

- Dilakukan pencegahan penyakit menular dengan cara yang sudah rutin dilaksanakan seperti surveilans, vaksinasi dan pendampingan atau penyuluhan. Sedangkan apabila terjadi wabah penyakit di Indonesia dilakukan pencegahan penyakit hewan menular secara intensif dan intensitas yang tinggi dan pemasukan hewan ke Tarakan diperketat .

- Penyediaan obat dan peralatan kesehatan hewan. Pemeriksaan kesehatan hewan, vaksinasi serta pengobatan hewan dilaksanakan secara regular dan berdasarkan permohonan atau laporan peternak apabila diperlukan.
- Pemberian penyuluhan dan pendampingan oleh para Petugas Penyuluh Lapangan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing PPL. Pemberian penyuluhan ini dilakukan secara rutin, akan tetapi apabila diperlukan, para peternak atau kelompok tani bisa menghubungi PPL untuk konsultasi;

f. Perbaikan dan Tindak Lanjut.

Untuk meningkatkan Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular di Kota Tarakan dapat dilaksanakan langkah – langkah berikut :

- Dilakukan surveilans dengan cakupan wilayah dan sampel yang memadai untuk dilakukan pemeriksaan sampel.
- Dengan melaksanakan budidaya peternakan yang baik dan dilaksanakan pemeriksaan hewan secara rutin.
- Dilakukan pengawasan lalu lintas keluar masuk hewan dan produk hewan.

g. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Indikator Produksi Hasil Peternakan dicapai dengan dukungan beberapa program dan dari beberapa sumber dana :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1.1 Kegiatan Pengawasan Obat di tingkat Pengecer

1.1.1 Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan dengan pagu 10.000.000 out put uji tapis screening pada daging. Dengan dilaksanakan uji ini dapat diketahui penyakit hewan atau produk hewan yang ada, sehingga dapat dilakukan pencegahan penyakit menular secara dini.



2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

2.1 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Penutupan dan Pembukaan daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

2.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada hewan, dengan pagu 25.009.020, sosialisasi dan pemeriksaan uji Brucella, Rabies dan Antrak. Dengan adanya pengujian ini diharapkan akan adadeteksi dini apabila ternak terjangkit suatu penyakit dan hal ini akan mengurangi resiko kematian ternak akibat penyakit t- penyakit tersebut



2.2 Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan daerah kabupaten/Kota

2.2.1 Sub Kegiatan Analisis Resiko Penyakit Hewan zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya, dengan pagu 4.999.870, dengan output sosialisasi juru sembelih. Dengan dilaksanakannya sosialisasi juru sembelih ini, akan memberikan rasa aman dalam mengkonsumsi daging dilihat dari

kehalalannya dan akan diketahui daging – daging yang mengandung penyakit dan daging yang sehat untuk dikonsumsi.



2.3 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten /Kota,

2.3.1 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium, dengan pagu dana 19.997.000

2.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan jasa Medik Veteriner 105.003.000 , output peralatan dan obat – obatan kesehatan hewan. Dengan tersedianya peralatan dan obat- obatan hewan tersebut pelayanan medic veteriner akan dapat dilaksanakan, sehingga kesehatan hewan akan terjaga yang akhirnya dengan pertumbuhan hewan yang sehat akan dapat meningkatkan produksinya.



2.4 Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

2.4.1 Sub Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Kegiatan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan

10.900.000, output peralatan pengawasan berupa personal computer, PC ini dipergunakan untuk pelayanan administrasi pendukung aktifitas pengawasan, sehingga hasil pengawasan tersimpan dengan baik dan aman.



h. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

e. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

f. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Pada Tabel 3.39, tentang hasil analisa persentase rata-rata capaian hasil sasaran kinerja dan penyerapan anggaran, terlihat bahwa persentase rata-rata capaian sasaran kinerja 101%, sedangkan capaian penyerapan anggaran pada program pendukung 95,13% sehingga pelaksanaan program prioritas termasuk kategori efisien.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.39 sebagai berikut:

Tabel 3.39 : Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran indikator kinerja Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		CAPAIAN	KEUANGAN		CAPAIAN
		OUTCOME / OUTPUT	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran 3 : Meningkatnya produksi pertanian							
	3.3.3 Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di tingkat Pengecer							
	3.3.3.1 Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Pemeriksaan hewan qurban	1 kali	1 kali	100%	10.000.000	5.593.000	55,93
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	9,1	10,78	110%			
	8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							
	4.8.1 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Penutupan dan Pembukaan daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota							
	4.8.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada hewan	Jumlah pemeriksaan laboratorium	4 jenis penyakit	4 jenis penyakit	100%	25.000.000	18.515.900	74,06
	4.8.2 Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan daerah kabupaten/Kota							
	4.8.2.1 Sub Kegiatan Analisis Resiko Penyakit Hewan zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Bimtek juru sembelih	1 kali	1 kali	100%	4.999.870	4.181.280	83,63
	3.4.3 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota							

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		CAPAIAN	KEUANGAN		CAPAIAN
		OUTCOME / OUTPUT	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
	3.4.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Uji borax	5 jenis	5 jenis	100%	19.997.000	18.212..500	91,08
	3.4.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan jasa Medik Veteriner	Bahan, alat dan obat kesehatan hewan	3 jenis	3 jenis	100%	105.003.900	104.326.480	99,35
	3.4.4 Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							
	3.4.4.1 Sub Kegiatan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Sarana pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	2 jenis	2 jenis	100%	10.900.000	10.900.000	100

j. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Dari segi input sumber daya manusia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mewujudkan tujuan, sasaran dan indikator serta targetnya dengan cara melaksanakan tugas fungsi masing – masing yang sudah tertuang pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja dengan tetap dilakukan pengawasan dan bimbingan secara berjenjang. Dengan demikian semua ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merasa memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan OPD. Penempatan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah berdasarkan Analisa Jabatan yang telah ditentukan, sehingga tidak ada overlapping sumber daya manusia pada suatu jabatan, sehingga dari segi sumber daya manusia Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian termasuk pada kategori Efisien

Sasaran 4 : Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelayanan Usaha Pertanian

Indikator 1 : Persentase Surat Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan

Indikator 2 : Cakupan waktu penyuluhan pertanian

Indikator 3 : Peningkatan kelembagaan petani (kelompok)

a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja pada tahun 2024

Tabel 3.40 : Capaian indikator kinerja Surat Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase Surat Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	%	95	97	102
Cakupan waktu penyuluhan pertanian (bulan/tahun)	Bulan / tahun	12	12	100
Peningkatan kelembagaan petani (kelompok)	kelompok	5	6	120

Realisasi kinerja dengan indikator Surat Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan Tahun 2024 dibandingkan target yang telah ditetapkan adalah : $97/95 \times 100\% = 102\%$. Realisasi kinerja dengan indikator Cakupan waktu penyuluhan pertanian (bulan/tahun) Tahun 2024 dibandingkan target yang telah ditetapkan adalah : $12 / 12 \times 100\% = 100\%$. Realisasi kinerja dengan indikator Peningkatan kelembagaan

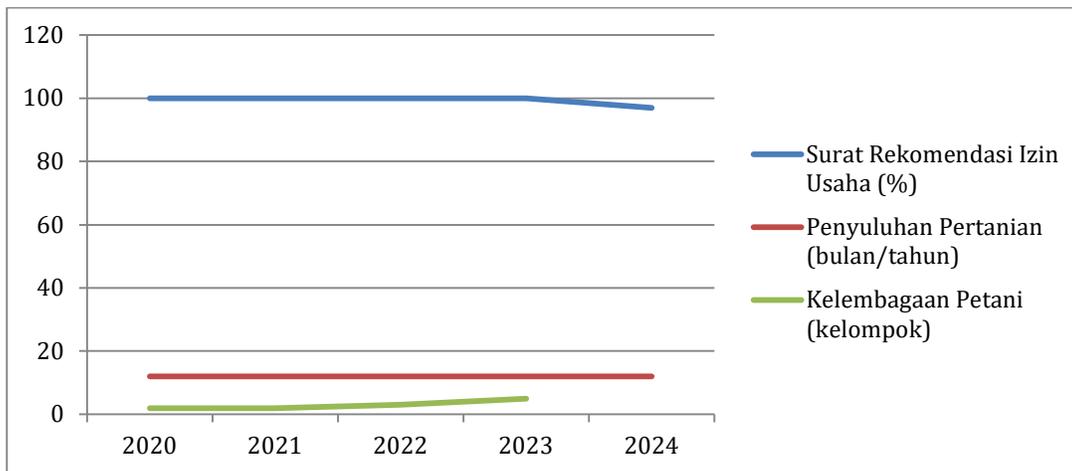
petani (kelompok) Tahun 2024 dibandingkan target yang telah ditetapkan adalah : $6/5 \times 100\% = 120\%$.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun - tahun sebelumnya

Tabel 3.41 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

No.	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Persentase Surat Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	97%
	Cakupan waktu penyuluhan pertanian (bulan/tahun)	12	12	12	12	12
	Peningkatan kelembagaan petani (kelompok)	-	-	1	3	6

Grafik 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya



c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Renstra.

Tabel 3.42 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan akhir Renstra

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024
		Target	Realisasi		
Persentase Surat Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	%	95	96	105	95
Cakupan waktu penyuluhan pertanian (bulan/tahun)	Bulan / tahun	12	12	100	12
Peningkatan kelembagaan petani (kelompok)	kelompok	5	6	120	10

Capaian kinerja dengan indikator Surat Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan pada tahun 2024 dibandingkan target akhir Renstra adalah : $(96 / 95) \times 100\% = 105\%$. Indikator cakupan waktu penyuluhan pertanian (bulan/tahun) pada tahun 2024 dibandingkan target akhir Renstra adalah : $(12 / 12) \times 100\% = 100\%$.

Capaian kinerja dengan indikator peningkatan kelembagaan petani (kelompok) pada tahun 2024 dibandingkan target akhir Renstra adalah : $(10 / 10\%) \times 100\% = 100\%$.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Faktor – faktor penting yang mempengaruhi peningkatan/penurunan dengan indikator :

- Surat Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan pada tahun 2024 adalah, kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha peternakan sudah semakin meningkat, sehingga dalam mengajukan surat rekomendasi tidak banyak kekurangan yang hal ini akan mempercepat proses penerbitan rekomendasi izin usaha peternakan.;
- Indikator cakupan waktu penyuluhan pertanian, selalu dilakukan penyuluhan pertanian secara rutin setiap bulan dari awal sampai akhir tahun di semua wilayah kerja masing – masing petugas penyuluh lapangan (PPL).
- Sedangkan indikator peningkatan kelembagaan petani (kelompok) pada tahun 2024 dilakukan dengan cara pemberian bimbingan baik itu dari segi manajemen pengelolaan kelompok maupun teknis budidaya pertanian, termasuk di dalamnya peternakan. Dengan adanya bimbingan ini diharapkan kelompok tani dapat ditingkatkan kelembagaannya.

e. Perbaikan dan Tindak Lanjut.

- Secara terus menerus dilakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha peternakan tentang bagaimana atau apa saja yang harus dilakukan dan disiapkan untuk mendapatkan rekomendasi izin usaha peternakan.
- Selain minat atau niat dari semua anggota kelompok tani dalam budidaya pertaniannya, peran para PPL juga sangat menentukan keberhasilan usaha pertanian di Kota Tarakan dengan cara pelaksanaan penyuluhan sepanjang tahun di wilayah kerja masing – masing penyuluh.
- Untuk meningkatkan kelembagaan kelompok tani, dilakukan dengan cara terus menerus pemberian bimbingan baik itu dari segi manajemen pengelolaan kelompok maupun teknis budidaya pertanian, termasuk di dalamnya peternakan, juga pada periode tertentu dilakukan evaluasi, atau lomba antar kelompok untuk memotivasi antar kelompok dengan kelompok lainnya.

f. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Indikator Surat Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan dicapai dengan melaksanakan:

1. Program Penyuluhan Pertanian

1.1 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

1.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan dan Desa , pagu Rp. 129.700.000,- dengan output pemberian insentif Petugas Penyuluh Lapangan yang diberikan kepada penyuluh lapangan, para penyuluh lebih termotivasi untuk mendampingi dan memberi penyuluhan kepada para petani di wilayah kerja masing – masing

Demplot pertanian terpadu diharapkan dapat meningkatkan intensitas pelatihan. Petani dapat melihat, mendengarkan dan mempraktekkan sehingga mereka termotivasi untuk melaksanakan usaha pertanian yang lebih baik sesuai dengan yang mereka dapatkan dan tetap didampingi oleh petugas penyuluh lapangan, dengan demikian diharapkan hasil usaha pertanian mereka akan meningkat yang secara otomatis akan berpengaruh kepada peningkatan pendapatan mereka.



1.1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, pagu Rp. 641.822.380,- dengan output bahan dan alat pelatihan budidaya sayuran. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para petani yang mengikuti pelatihan akan mempraktekkan dalam budidaya pertanian mereka dan dapat menularkan kepada petani dengan demikian produksi pertanian mereka khususnya usaha budidaya sayuran akan menghasilkan produksi yang optimal.



g. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
2. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.43 sebagai berikut:

Tabel 3.43 : Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran indikator kinerja Persentase Surat Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan , Cakupan waktu penyuluhan pertanian, Peningkatan kelembagaan petani (kelompok)

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		CAPAIAN	KEUANGAN		CAPAIAN
		OUTCOME / OUTPUT	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelayanan Usaha Pertanian	Persentase Surat Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan						
	4.1 Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan waktu penyuluhan pertanian (bulan/tahun)						
	4.1.1 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan	Peningkatan kelembagaan petani (kelompok)						
	4.1.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan KapasitasKelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Demplot Pertanian terpadu di kebun contoh	1 unit	1 unit	100%	315.150.000	313.562.500	99,5
	4.1.1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Peningkatan kelompok	5 kelompok	6 kelompok	120%	641.822.380	634.951.160	98,93
								98%

Pada Tabel 3.43, tentang hasil analisa persentase rata-rata capaian hasil sasaran kinerja dan penyerapan anggaran, terlihat bahwa persentase rata-rata capaian sasaran kinerja 108%, sedangkan penyerapan anggaran pada program prioritas 97,3% sehingga pelaksanaan program prioritas termasuk kategori efisien. Begitu juga pada pelaksanaan program pendukung, rata-rata capaian hasil sasaran kinerja 99,97% dan penyerapan anggaran 98,32%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pendukung juga termasuk kategori efisien.

k. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Dari segi input sumber daya manusia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mewujudkan tujuan , sasaran dan indikator serta targetnya dengan cara melaksanakan tugas fungsi masing – masing yang sudah tertuang pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja dengan tetap dilakukan pengawasan dan bimbingan secara berjenjang. Dengan demikian semua ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merasa memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan OPD. Penempatan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah berdasarkan Analisa Jabatan yang telah ditentukan, sehingga tidak ada overlapping sumber daya manusia pada suatu jabatan, sehingga dari segi sumber daya manusia Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian termasuk pada kategori Efisien.

Berdasarkan data keuangan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024, maka realisasi dan capaian keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024 Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.44 Perbandingan Anggaran

NO	Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Prioritas	7.550.466.080	7.454.452.928,-	98
2	Pendukung	6.809.009.783	6.694.620.915	98,32
Total Capaian Anggaran		14.359.475.863	14.149.073.843	98,53

Dari program prioritas, terlihat bahwa sasaran strategis didukung dengan anggaran prioritas sebesar Rp.7.550.166.080,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 7.454.452.928,- sehingga serapan capaian menunjukkan angka 98%. Sedangkan anggaran Program Pendukung adalah Rp.6.809.009.783,- dengan realisasi Rp.6.694.620.915,- atau 98,32%. Dari tabel 3.44 di atas dapat kita lihat perbedaannya, bahwasanya besaran untuk anggaran prioritas dan pendukung adalah lebih besar pendukung.

Perbandingan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang bersumber dari dana APBD Kota Tarakan Tahun 2020 s/d Tahun 2024, di sajikan

Dalam tabel 3.45 berikut:

Tabel 3.45. Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Kota Tarakan

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2020	5.165.343.624	4.727.814.745	437.528.879	91,53
2	2021	7.106.448.839	6.936.818.133	168.349.705.,99	97,61
3	2022	9.856.957.231	9.651.981.345	204.975.886	97,92
4	2023	10.490.820.661	10.119.111.931	371.708.730	96
5	2024	14.359.475.863	14.149.073.843	210.402.020	98,53

Sumber : Laporan Konsolidasi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

BAB IV

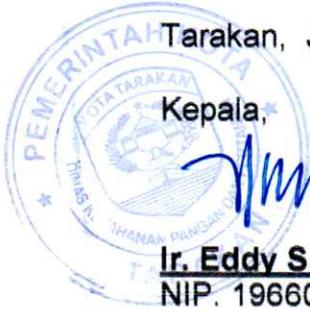
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 yang terdiri dari 5 sasaran dan 17 indikator, adalah kategori “sangat tinggi” dengan capaian rata – rata 107,9. Dari 17 indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian 95% yaitu Nilai atau Predikat SAKIP dan Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH), 5 indikator capaian kinerjanya 100% dan 10 indikator capaian kinerjanya lebih dari 100%.

B. Tindak Lanjut Rekomendasi

Dua indikator dengan capaian 95% yaitu Nilai / Predikat SAKIP dan Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan sebetulnya sudah baik, akan tetapi kurang memuaskan, untuk meningkatkan capaian indikator Nilai / predikat SAKIP, untuk yang akan datang disarankan untuk memperbaiki RENSTRA baik pada waktu penyusunan maupun pelaksanaan reuiu apabila diperlukan. Selanjutnya pada penyusunan RENJA begitu juga untuk lebih mempertimbangkan target dari sasaran dan indikatornya berdasarkan RENSTRA yang telah disusun untuk menyelesaikan masalah yang ada. Penetapan Indikator Kinerja Utama maupun Perjanjian Kinerja juga harus mengacu pada RENSTRA dan RENJA. Perjanjian kinerja seyogyanya dievaluasi setiap periode tertentu misalnya setiap triwulan apabila terdapat kesenjangan antara target dan realisasi, dapat segera dilakukan pengendalian agar target yang sudah ditetapkan bisa tercapai.



Tarakan, Januari 2025

Kepala,

Eddy Suriansyah

Ir. Eddy Suriansyah, M.Si

NIP. 19660625 199803 1 001